



NASIONAL

Pakar: Bola Pemakzulan Gibran Ada di DPR

Oleh Redaksi · 31 Okt, 19.27 WIB



Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan anak Sulung Mantan Presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Pakar hukum tata negara UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Prof. Dr. Sugianto menilai, DPR memiliki peran penting dalam menyikapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyetaraan ijazah SMA.

Sugianto berpandangan, persoalan tersebut tidak lagi sebatas

polemik persyaratan pencalonan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Menurutnya, persoalannya kini menyangkut legalitas jabatan wakil presiden dan kemungkinan pelanggaran konstitusi.

"Bola pemakzulan Wapres (Gibran) ada di DPR," kata Sugianto saat dimintai tanggapan oleh Monitorindonesia.com Sabtu (31/10/2026).

Ia menjelaskan, mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden telah diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Namun, proses tersebut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pendapat seorang pakar atau desakan Politik, melainkan harus melalui tahapan konstitusional.

Menurut Sugianto, DPR perlu terlebih dahulu menyikapi persoalan tersebut melalui mekanisme

yang berlaku sebelum prosesnya berlanjut ke MK dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Pemakzulan itu bukan karena Prabowo, tetapi oleh DPR," ujarnya.

Sugianto juga menilai, Presiden Prabowo Subianto dapat mengambil inisiatif politik dengan mengundang partai-partai politik ...

DALAM EDISI INI

NASIONAL	2
ACEH	14
HIBURAN	18
LINGKUNGAN	21
Aneka Berita	23

NASIONAL

Pengacara Tegaskan Putusan MA Batalkan Suket Ijazah Tak Berlaku Surut: Gibran Tetap Wapres



BANDA ACEH - Kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA tidak memengaruhi posisi

kliennya sebagai wakil presiden (wapres).

"Saya menilai Putusan MA yang mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka, yang ...

[Selengkapnya di halaman 2 »](#)

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Khozinudin cs Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara, Serahkan Surat Desakan soal Gibran



BANDA ACEH - Koordinator Aliansi Rakyat Menggugat, Ahmad Khozinudin, menyerahkan surat berisi aspirasi agar Presiden Prabowo Subianto menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan-

nya. Namun, surat tersebut hanya diterima petugas yang berjaga di kediaman Prabowo karena mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya.

[Selengkapnya di halaman 3 »](#)

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

[Selengkapnya di halaman 2 »](#)

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Jubir Gerindra: Putusan MA soal Gibran Harus Disikapi Serius



BANDA ACEH -Partai Gerindra menghormati sepenuhnya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan penyetaraan sekolah menengah atas

(SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso bahkan menyebut putusan MA harus disikapi serius sesuai ketentuan hukum.

[Selengkapnya di halaman 3 »](#)

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

KPK Bergerak Usai Tetapkan Dedi Congor Tersangka, Dua Kantor Bea Cukai Digeledah



Semarang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak dalam pengusutan dugaan korupsi di sektor cukai dengan mengeledah dua kantor Bea Cukai di wilayah Semarang, Jawa Tengah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan resminya pada Sabtu, (31/10/2026) membenarkan adanya pengeledahan tersebut.

[Selengkapnya di halaman 4 »](#)

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Pakar: Bola Pemakzulan Gibran Ada di DPR

Oleh Redaksi · 31 Okt, 19.27 WIB



Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan anak Sulung Mantan Presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Pakar hukum tata negara UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Prof. Dr. Sugianto menilai, DPR memiliki peran penting dalam menyikapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyetaraan ijazah SMA.

Sugianto berpandangan, persoalan tersebut tidak lagi sebatas polemik persyaratan pencalonan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Menurutnya, persoalannya kini menyangkut legalitas jabatan wakil presiden dan kemungkinan pelanggaran konstitusi.

"Bola pemakzulan Wapres (Gibran) ada di DPR," kata Sugianto saat dimintai tanggapan oleh Monitorindonesia.com Sabtu (31/10/2026).

Ia menjelaskan, mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden telah diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Namun, proses tersebut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pendapat seorang pakar atau desakan Politik, melainkan harus melalui tahapan konstitusional.

Menurut Sugianto, DPR perlu terlebih dahulu menyikapi persoalan tersebut melalui mekanisme yang berlaku sebelum prosesnya berlanjut ke MK dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Pemakzulan itu bukan karena Prabowo, tetapi oleh DPR," ujarnya.

Sugianto juga menilai, Presiden Prabowo Subianto dapat mengambil inisiatif politik dengan mengundang partai-partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran untuk membahas polemik ijazah Gibran.

Guru Besar hukum tata negara itu berpandangan, partai politik (parpol) atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon memiliki peran dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Prabowo sebagai presiden bisa saja mengundang parpol pengu-sung untuk menyikapi dan membahas polemik ijazah Gibran ini," katanya.

Dengan demikian, Sugianto menegaskan bahwa keputusan mengenai pemberhentian wakil presiden tidak berada di tangan Presiden Prabowo secara sepihak.

Ia merujuk mekanisme konstitusional yang mengharuskan DPR menyampaikan pendapat, kemudian MK memeriksa dan memutus pendapat tersebut sebelum proses berlanjut ke MPR sesuai ketentuan UUD 1945.

Dalam pandangannya, Sugianto turut menyoroti persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden yang menjadi pokok polemik.

Ia menilai bahwa persoalan surat keterangan penyetaraan ijazah perlu dilihat dalam kaitannya dengan ketentuan persyaratan pencalonan yang berlaku.

"Kalau berbicara Pasal 6A, otomatis syarat-syarat itu tidak ditempuh, itu melanggar konstitusi," ujarnya.

Sugianto juga menyebut, putusan kasasi MA terkait surat keterangan (Suket) SMA Gibran hanya sebagai pelengkap dalam polemik tersebut.

Persoalan ini, lanjut Sugianto, seharusnya menjadi momentum bagi partai politik dan DPR untuk menunjukkan sikap terhadap persoalan yang menyangkut ...

NASIONAL

Pengacara Tegaskan Putusan MA Batalkan Suket Ijazah Tak Berlaku Surut: Gibran Tetap Wapres

Oleh Redaksi · 31 Okt, 19.17 WIB



BANDA ACEH - Kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA tidak memengaruhi posisi kliennya sebagai wakil presiden (wapres).

"Saya menilai Putusan MA yang mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi syarat administrasi pencalonan sebagai wakil presiden dalam Pemilu 2024 tidak mempengaruhi posisi Gibran sebagai Wapres," ujar Rullyandi saat dihubungi, Sabtu (31/10/2026).

Rullyandi berpendapat, putusan MA tersebut tidak dapat dieksekusi secara sempurna karena terdapat keadaan hukum yang sudah berubah ketika putusan dijatuhkan.

Menurutnya, MA baru memutus perkara tersebut setelah tahapan Pilpres 2024 selesai dan Gibran dilantik sebagai Wakil Presiden. Karena itu, dia menilai putusan tersebut tidak berlaku surut atau bersifat retroaktif.

"Adapun keadaan yang dimaksud yakni MA memutuskan setelah tahapan Pilpres 2024 selesai dan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden dilakukan. Sehingga Putusan MA ini tidak berlaku surut atau tak bersifat retroaktif," ujar Rullyandi.

Dia menilai putusan MA tersebut telah memenuhi kualifikasi dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Rullyandi merujuk Pasal 117 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

yang, menurutnya, mengatur bahwa putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna karena telah terjadi perubahan keadaan hukum sebelumnya tidak dapat dieksekusi.

"Nah, telah terjadi keadaan hukum yang berubah yaitu disebabkan karena suket itu sudah digunakan untuk kepentingan pemilu pada saat itu, di mana tahapan pemilu sudah selesai. Putusan MA tersebut meskipun sudah berkekuatan hukum tetap, namun tidak bisa dilaksanakan secara sempurna, non-executable," ucap Rullyandi.

Dia juga menilai putusan tersebut tidak dapat dijadikan rujukan untuk pelaksanaan upaya Politik DPR dalam proses pemakzulan. Selain itu, menurutnya, masih terbuka upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK) yang dapat ditempuh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selaku pihak tergugat.

"Yang tidak bisa juga dijadikan rujukan pelaksanaan eksekusi terhadap upaya politik DPR di ranah pemakzulan. Di samping itu juga Putusan MA masih terbuka ruang upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali yang dapat ditempuh Kemendikdasmen selaku pihak tergugat," imbuhnya.

MA Kabulkan Kasasi Gugatan Suket Gibran

Sebelumnya, MA mengabulkan seluruh permohonan kasasi yang diajukan HM Subhan Palal terkait gugatan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Laskar Cinta Jokowi: Nilai Gibran E Itu Excellent, C Clever

Oleh Redaksi · 30 Okt, 23.36 WIB

BANDA ACEH - Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, membela Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait polemik nilai akademik yang kembali menjadi perbincangan publik. Ia menilai terdapat upaya pembungkaman negatif atau framing untuk membangun persepsi buruk terhadap Gibran. Suhandono menegaskan, nilai Gibran yang beredar dengan keterangan E berarti Excellent, C berarti Clever, dan B berarti Brilliant.

Menurut dia, penilaian tersebut tidak semestinya langsung digunakan untuk meragukan kecerdasan maupun kemampuan akademik

putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut.

"Gibran seorang yang cerdas dan sekolahnya di Australia dan Singapura. Ada upaya framing jahat menjatuhkan Gibran," ungkap Suhandono, Jumat (30/10/2026).

Ia menilai latar belakang pendidikan Gibran di luar negeri juga perlu menjadi bagian dari pertimbangan publik dalam melihat kapasitas pribadi Wakil Presiden. Karena itu, polemik mengenai nilai akademik seharusnya dibahas secara objektif, bukan dijadikan alat untuk membentuk opini negatif.

Menurut Suhandono, perdebatan mengenai dokumen pendidikan dan penafsiran nilai tidak boleh dicampurkan dengan penilaian terhadap kemampuan seseorang. Penjelasan mengenai sistem penilaian harus merujuk pada dokumen resmi dan keterangan lembaga pendidikan yang menerbitkannya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah menerima informasi yang beredar tanpa memeriksa sumber dan keasliannya. Apalagi, isu pendidikan Gibran telah menjadi bagian dari perdebatan Politik yang berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintahan.

NASIONAL

Gibran Siap Buka-Bukaan Tapi Denny Indrayana Malah Mundur

Oleh Redaksi · 30 Okt, 19.33 WIB

BANDA ACEH -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara soal langkah hukum pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, bersama tim kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan pencabutan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

"Kita hormati seluruh proses peradilan yang ada di PTUN. Harapannya, seluruh proses dari awal sampai akhir ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan kejelasan kepada warga," kata Gibran usai melaksanakan Salat Jumat di Masjid Jami Ar-Ridho, Jelambar, Jakarta Barat, 30 ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

MA Batalkan Suket Ijazah SMA Gibran, Denny Indrayana: Apa Dasar Masih Menjabat Wapres?

Oleh Redaksi · 30 Okt, 19.44 WIB

BANDA ACEH - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan seluruh permohonan kasasi yang diajukan HM Subhan Palal terkait keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut diterbitkan melalui e-Court pada Jumat

(30/10/2026) dengan nomor perkara 742 K/TUN/2026.

Menanggapi putusan tersebut, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana menilai perkembangan ini penting bagi dinamika hukum tata negara di Indonesia.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Khozinudin cs Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara, Serahkan Surat Desakan soal Gibran

Oleh Redaksi · 31 Okt, 19.21 WIB



BANDA ACEH - Koordinator Aliansi Rakyat Menggugat, Ahmad Khozinudin, menyerahkan surat berisi aspirasi agar Presiden Prabowo Subianto menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Namun, surat tersebut hanya diterima petugas yang berjaga di kediaman Prabowo karena mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya.

Penyerahan surat itu berlangsung saat Khozinudin bersama rombongan mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10/2026). Sejumlah anggota Paspampres tampak berjaga di lokasi.

Mulanya, Khozinudin menggelar konferensi pers di depan rumah Prabowo sembari menunggu petugas berkoordinasi mengenai prosedur penyerahan surat tersebut.

Namun, petugas kemudian menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti penyerahan surat. Khozinudin pun akhirnya menyerahkan surat itu kepada petugas yang berjaga.

"Pak Prabowo lihat, Pak. Ini kami cuma mau menyerahkan surat, membantu pemerintah, membantu melaksanakan kewenangan presiden, membantu presiden menjalankan sumpah sebagai presiden untuk menjalankan konstitusi dan tidak berkhianat pada rakyat," ujar Khozinudin saat menyerahkan surat kepada petugas.

Khozinudin kemudian meminta petugas menerima surat tersebut. Petugas berpakaian merah muda itu tampak menerima dan memegang surat yang diserahkan.

"Diterima saja," ucapnya kepada petugas.

Setelah surat diterima, Khozinudin bersama rombongan langsung meninggalkan lokasi.

"Kita sudah serahkan, yang penting," ujarnya.

Petugas yang berjaga kemudian mengimbau Khozinudin dan rombongan meninggalkan lokasi karena kawasan tersebut merupakan area steril.

"Maaf, Bu. Terima kasih," ujar petugas sembari meminta rombongan meninggalkan area.

Yakin Surat Sampai ke Prabowo

Usai penyerahan surat, Khozinudin mengatakan pihaknya menyerahkan tindak lanjut surat tersebut kepada petugas di lingkungan kediaman Prabowo. Meski tidak diserahkan langsung kepada Prabowo, dia meyakini aspirasi yang disampaikan akan sampai kepada presiden.

"Kami serahkan kepada penjaga yang ada di lingkungan rumah

Presiden Prabowo Subianto. Soal kewenangan lebih lanjut kami serahkan kepada beliau yang menjaga. Namun, yang paling penting, karena kami juga sudah menyampaikan dalam bentuk video, kami meyakini ini akan sampai kepada Pak Prabowo, juga kepada seluruh rakyat," kata Khozinudin.

Dia menjelaskan, pihaknya sempat berkoordinasi dengan petugas mengenai prosedur penyerahan surat. Menurutnya, petugas bukan menolak surat tersebut, melainkan merasa tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya.

"Enggak penolakan, ya. Hanya koordinasi tentang apakah pimpinannya akan menindaklanjuti melalui prosedur seperti apa," kata Khozinudin.

NASIONAL

Jubir Gerindra: Putusan MA soal Gibran Harus Disikapi Serius

Oleh Redaksi · 31 Okt, 19.11 WIB



BANDA ACEH -Partai Gerindra menghormati sepenuhnya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan penyetaraan sekolah menengah atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso bahkan menyebut putusan MA harus disikapi serius sesuai ketentuan hukum.

"Kita menghormati putusan Mahkamah Agung sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Setiap putusan pengadilan tentu harus disikapi secara serius dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Sugiat kepada wartawan, Sabtu, 31 Oktober 2026.

Karena itu, keduanya tidak boleh serta-merta disamakan.

"Kita berharap kementerian terkait dan lembaga yang berwenang dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tindak lanjut putusan tersebut, termasuk implikasinya terhadap administrasi pencalonan pada waktu itu," katanya.

Menutup pernyataannya, Sugiat menegaskan Gerindra pada prinsipnya menghormati independensi lembaga peradilan, terutama MA. Gerindra memastikan setiap persoalan ketatanegaraan diselesaikan melalui mekanisme konstitusional.

"Prinsipnya, kita menghormati independensi lembaga peradilan, menjunjung kepastian hukum, dan memastikan setiap persoalan ketatanegaraan diselesaikan melalui mekanisme konstitusional," tegasnya.

MA mengabulkan kasasi gugatan surat keterangan (Suket) penyetaraan sekolah menengah atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lewat amar putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan atau Suket penyetaraan SMA Gibran yang menjadi syarat pencalonannya di Pilpres 2024 tidak sah.

Amar putusan tersebut dibacakan hari ini, Jumat, 30 Oktober 2026, dan dikonfirmasi HM Subhan selaku penggugat dalam perkara tersebut lewat nomor putusan kasasi 742 K/TUN/2026.

"Saya dapat pemberitahuan melalui e-court saya dari MA. Tanggal 30 Oktober 2026. Terhadap proses nomor 742/K/TUN/2026, amar putusan-nya kabul kasasi," kata Subhan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

PERBAKIN: Rapat Bersama, Hasilnya ke Mana?

Oleh Redaksi · 30 Okt, 19.37 WIB

OLEH: UMAR SURYA FANA

DALAM olahraga menembak, sasaran harus jelas dan aturan wajib dipatuhi. Peluru melenceng sedikit, nilai berkurang. Namun, dalam urusan organisasi, tampaknya sedang muncul pertanyaan menarik: kalau keputusan melencong dari hasil rapat, siapa yang menghitung nilainya?

Pertanyaan itu layak dialamatkan kepada PB PERBAKIN. Rakernas pada 18-19 Juli 2026 telah menghasilkan berita acara, keputusan, serta usulan susunan Tim Penjaringan dan Penyaringan atau TPP bakal calon ketua umum. Ada pembahasan, ada nama, ada tanda tangan pimpinan

sidang. Pendeknya, ini bukan hasil obrolan sambil menunggu kopi.

Berita acara mencatat nama Mus Mulyadi, Rasminto, Teguh Prinaryanto, Hendro Susanto, dan Dedi Suprpto dalam susunan usulan TPP. Forum juga mengamankan ketua umum menjalankan hasil Rakernas serta menugaskan sekretaris jenderal mengurus administrasi pembentukannya. Pesannya cukup terang, bahkan tanpa bantuan teropong bidik.

Lalu terbit SKEP Nomor 031/SKEP/KU/PB/X/2026, tanggal 28 Oktober 2026. Susunannya berubah total: Tarmizi, Andri Yuliyanto, H. Sarifudin A Darmasyah, Jeffry Subarkah, dan Misransyah. Lima nama dari

forum berganti lima nama lain. Ini sudah melampaui salah ketik. Salah ketik biasanya mengganti huruf, bukan mengganti satu rombongan.

Di sinilah PB perlu menjelaskan dasar dan proses perubahan tersebut. Benar, berita acara menggunakan istilah "usulan". Tetapi usulan hasil forum resmi, disertai mandat pelaksanaan, tentu membutuhkan perlakuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kata "usulan" jangan sampai menjadi pintu darurat untuk mengungsikan seluruh kehendak peserta rapat.

Kalau ada alasan aturan, bukalah aturannya. Kalau ada keberatan atas proses Rakernas, jelaskan keberatannya. Kalau ada keputu-

san organisasi yang mengubah hasil forum, tunjukkan dokumennya. Pengurus berhak memberikan penjelasan, dan anggota berhak mengujinya. Organisasi sehat tidak membutuhkan ilmu kebatinan untuk memahami keputusan pengurusnya.

Tanpa penjelasan yang memadai, perubahan menyeluruh itu patut dibaca sebagai pengingkaran terhadap mandat Rakernas. Di situlah kata "pengkhianatan" memperoleh bobot moralnya: ketika kesepakatan yang dibangun bersama kehilangan tempat dalam pelaksanaan. Kritik ini menyasar pertanggungjawaban keputusan, tanpa perlu menebak isi kepala siapa pun.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Ancam Parang, Pemuda Bejat di Labusel Perkosa Nenek 67 Tahun di Kebun Sawit

Oleh Redaksi · 30 Okt, 09.54 WIB

BANDA ACEH – Perbuatan bejat dilakukan pemuda berinisial N (21) di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara. Pelaku nekat memerkosanenek berusia 67 tahun di area perkebunan kelapa sawit.

Aksi keji tersebut terjadi saat korban tengah beraktivitas mencari lidi sawit di perkebunan warga pada Senin (19/10/2026) siang.

Pendamping korban sekaligus aktivis pemuda setempat, David Arjuna Sihombing menjelaskan,

saat kejadian korban mendadak dihampiri pelaku N.

Pelaku kemudian merebut parang milik korban yang biasa digunakan untuk memotong lidi, lalu menggunakannya untuk mengancam keselamatan korban agar menuruti nafsu bejatnya.

"Pelaku tiba-tiba mendekati korban lalu mengambil parang yang dipakai mencari lidi sawit. Pelaku lalu mengancam korban," ujar David Arjuna Sihombing usai mendampingi korban melapor ke Mapolres Labuhanbatu Selatan, Kamis (29/10/2026).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

KPK Bergerak Usai Tetapkan Dedi Congor Tersangka, Dua Kantor Bea Cukai Digeledah

Oleh Van · 31 Okt, 17.47 WIB



Seorang profesional berbagi wawasan dalam sebuah diskusi yang menarik.

Semarang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak dalam pengusutan dugaan korupsi di sektor cukai dengan mengegedah dua kantor Bea Cukai di wilayah Semarang, Jawa Tengah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan resminya pada Sabtu, (31/10/2026) membenarkan adanya pengeledahan tersebut. Pengeledahan dilakukan di Kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah pada Jumat (30/10/2026).

Dari kegiatan tersebut, penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Penyidik juga menyita sejumlah uang tunai yang nominalnya hingga kini masih dalam proses penghitungan.

“Hari ini Penyidik melanjutkan kegiatan pengeledahannya di

wilayah Semarang. Dua lokasi yang dilakukan pengeledahan yakni di Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah,” ujar Budi.

Menurut Budi, dokumen dan barang bukti elektronik yang diamankan diduga berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara di sektor cukai.

“Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah uang tunai. Untuk nominalnya masih proses penghitungan,” ucap Budi.

Seluruh barang bukti yang ditemukan dalam rangkaian pengeledahan tersebut selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis oleh penyidik.

Langkah itu dilakukan untuk memperkuat bukti-bukti yang diperlukan KPK dalam mengungkap perkara yang sedang disidik.

Pengeledahan Dilakukan Setelah Dedi Congor Jadi Tersangka Pengeledahan di Semarang dilakukan tidak lama setelah KPK mengumumkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka.

Dedi merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Ia diketahui telah beberapa kali dipanggil dan menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK sebelum status hukumnya diumumkan.

KPK kemudian menyurati Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah Dedi bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

Namun, penting dicatat, pengeledahan kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi terkait kerugian negara di sektor cukai.

KPK masih melakukan pendalaman terhadap barang bukti yang ditemukan.

Sementara penetapan Dedi Congor sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penanganan perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan DJBC yang sebelumnya telah diungkap KPK.

Total 9 Tersangka dalam Rangkaian Perkara

Dengan penetapan Dedi Congor, KPK menyebut telah memproses total sembilan tersangka dalam rangkaian perkara yang bermula dari pengungkapan dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bea Cukai.

NASIONAL

KPU Perlu Keluarkan Surat Gibran Tidak Memenuhi Syarat Wapres

Oleh Redaksi · 31 Okt, 19.08 WIB



BANDA ACEH -Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta segera mengeluarkan surat yang menyatakan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden harus batal secara hukum.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti merespons putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan kasasi perihal surat keterangan (Suket) penyetaraan sekolah menengah atas (SMA) milik Gibran Rakabuming Raka dinyatakan batal demi hukum.

Terlebih, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah memutuskan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Di mana dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan Gibran.

“Segera meminta kepada KPU mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa pencalonan Saudara Gibran sebagai wakil presiden itu dinyatakan batal secara hukum,” tegas Ray kepada wartawan, Sabtu, 31 Oktober 2026.

Atas dasar itu, Ray berharap KPU harus sesegera mungkin menerbitkannya surat tersebut karena penyelenggara pemilu yang

menyatakan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Selanjutnya, kata Ray, fraksi-fraksi partai Politik yang ada di DPR bisa segera mengambil keputusan atas keputusan MK dan MA tersebut.

“Bila sebelumnya saya mendorong angket dilakukan untuk menyelidiki terkait dengan keberadaan ijazah Saudara Gibran karena diakui bahwa ijazah itu ada di tangan mereka, maka dengan dua putusan ini rasa-rasanya Hak Angket pun sudah terlampaui. Dan oleh karena itu, langkah politik yang harus dilakukan oleh anggota DPR sekarang adalah hak menyatakan pendapat alias HMP,” katanya.

Ray menilai bahwa semestinya partai politik mengambil alih tanggung jawab politik dan tanggung jawab moral, bahkan memiliki kewajiban politik dan kewajiban moral, untuk segera menggunakan hak menyatakan pendapat.

Lebih jauh dari itu, Ray pun meminta Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, daripada terus-menerus bertahan di posisi hukum yang jelas-jelas dinyatakan oleh MK maupun MA harus batal demi hukum.

“Rasa-rasanya tidak ada lagi alasan yang cukup kuat secara hukum maupun secara politik untuk tetap bertahan sebagai wakil presiden,” pungkasnya

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

MA Nyatakan Suket Gibran Tidak Sah, Denny Indrayana: Mas Gibran Mundur Deh

Oleh Redaksi · 30 Okt, 19.51 WIB

BANDA ACEH – Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mendesak Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Desakan itu disampaikan menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan kasasi advokat Subhan Palal, yang meminta Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Gibran untuk Pilpres 2024 dinyatakan tidak sah.

Denny menilai, dikabulkannya gugatan tersebut semakin memperkuat persoalan mengenai keab-

sahan persyaratan pendidikan Gibran sebagai wakil presiden.

Menurut dia, putusan MA memiliki konsekuensi terhadap keberadaan Suket yang selama ini menjadi salah satu dasar pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran.

“Gugatan Pak Subhan dikabulkan, logikanya permohonan Pak Subhan untuk pembatalan suket batal. Jadi artinya memang batal suketnya ya,” kata Denny Indrayana dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/10).

Denny mempertanyakan dasar yang masih digunakan Gibran

untuk tetap menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia setelah adanya putusan tersebut.

Dia menilai, pembatalan Suket itu semestinya menjadi persoalan serius bagi keberlanjutan jabatan Gibran sebagai wakil presiden.

“Dengan suket batal, apalagi dasar Saudara Gibran masih tanpa malu duduk sebagai wakil presiden?” tegas Denny.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menyebut butuh kesadaran bagi Gibran untuk mundur dari jabatan wakil presiden.

“Tinggal dua nih modal beliau. Mundur, untuk mundur itu hanya dua lagi modalnya: tahu diri dan tahu malu,” cetus Denny.

Denny turut menyinggung gugatan yang diajukan Mercy Christy Barends di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dia menilai, putusan MA yang mengabulkan gugatan Subhan Palal semakin memperkuat argumennya agar gugatan Mercy di PTUN juga dikabulkan.

“Tapi kalau ini jalan, mestinya PTUN tidak boleh bertentangan dengan Mahkamah Agung dong, iya dong?”

NASIONAL

Dorong Pemakzulan Gibran, Denny Indrayana Ngaku Sudah Komunikasi dengan PDIP

Oleh Redaksi · 30 Okt, 11.05 WIB

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana mengakui sudah membangun komunikasi dengan elite PDI Perjuangan (PDIP) terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan Denny saat dikonfirmasi soal partai Politik lain yang telah didekati selain Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dia mengklaim, PDIP merespons positif usulan tersebut.

“Saya komunikasi dengan teman-teman PDIP, eh mereka kelihatannya sedang berproses secara internal,” kata Denny, dikutip Jumat (30/10/2026).

Kendati demikian, hingga saat ini dirinya belum melakukan pertemuan secara formal dengan

partai berlambang banteng tersebut.

“Kalau pertemuan terbukanya belum, belum ada,” ujarnya.

Denny enggan mengungkap siapa elite PDIP yang sudah berbicara secara informal dengan dirinya.

Dia juga tak bisa membeberkan lebih jauh bagaimana sikap PDIP terhadap opsi pemakzulan ini.

“Lebih bagus teman-teman PDIP yang jawab itulah (sikapnya). Saya sih optimis saja,” kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengakui telah bertemu Sekjen PKS

M Kholid untuk membahas aspirasi masyarakat tentang usulan Hak Angket ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Update Tarif Listrik November 2026, Ini Penyebab Saldo Token Berbeda dari Nominal Pembelian

Oleh Van · 31 Okt, 16.10 WIB



Petugas PLN melakukan pengecekan rutin pada meteran listrik untuk memastikan layanan energi yang optimal.

Jakarta — Tarif listrik PLN November 2026 dipastikan tidak mengalami perubahan untuk seluruh golongan pelanggan, termasuk pada periode 2 hingga 8 November. Ketentuan tarif tersebut mengacu pada penyesuaian Triwulan IV 2026 yang berlaku Oktober hingga Desember.

Meski tarif per kWh tetap, pelanggan prabayar perlu memahami bahwa nominal pembelian token tidak seluruhnya dikonversikan menjadi energi listrik. Ada potongan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan biaya administrasi yang memengaruhi jumlah kWh yang diterima.

Tarif Listrik PLN November 2026 Tetap

Melalui laman resminya, PLN mencantumkan dokumen penyesuaian tarif untuk Triwulan IV 2026. Perusahaan menyebut tarif tenaga

listrik mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024.

Penyesuaian tarif untuk golongan tertentu mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, seperti nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), dan inflasi.

Dengan tarif yang tidak berubah pada triwulan tersebut, pelanggan rumah tangga, bisnis, industri, hingga golongan lainnya tetap menggunakan ketentuan tarif yang sama selama November.

Mengapa Token Rp50.000 Tidak Sepenuhnya Menjadi kWh?

PLN menjelaskan bahwa pembelian listrik prabayar pada dasarnya merupakan pembelian energi dalam satuan kilowatt hour (kWh), bukan saldo rupiah seperti pulsa telepon seluler.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, menjelaskan mekanisme tersebut dalam keterangan resmi perusahaan.

“Pada sistem prabayar, pelanggan membeli alokasi energi listrik dalam jumlah tertentu. Alokasi ini digunakan oleh seluruh peralatan listrik di rumah dan akan berkurang seiring pemakaian. Karena itu, total energi tersedia dalam satuan kilowatt hour (kWh),” ujar Gregorius.

Dalam setiap transaksi token, terdapat komponen yang dipotong sebelum nominal pembelian dikonversikan menjadi kWh. Komponen tersebut meliputi PPJ yang besarnya ditetapkan pemerintah daerah dan biaya administrasi sesuai kanal pembelian.

Artinya, pelanggan yang membeli token senilai Rp50.000 tidak otomatis memperoleh energi listrik senilai nominal tersebut setelah dikonversikan. Besaran kWh yang masuk ke meteran juga dipengaruhi golongan tarif dan ketentuan pajak daerah.

PLN memberikan contoh pembelian token Rp100.000 untuk pelanggan rumah tangga berdaya 1.300 VA. Setelah dikurangi PPJ dan biaya administrasi, nilai yang dikonversikan menjadi energi listrik berada di kisaran Rp90.000 hingga Rp94.000.

Dengan tarif listrik Rp1.444,70 per kWh, pembelian tersebut setara sekitar 63 hingga 65 kWh.

PLN Ingatkan Pelanggan Memahami Sistem Token

NASIONAL

Gumarang Soroti Perubahan Sikap Rocky Gerung Setelah Masuk Lingkaran Istana

Oleh Redaksi · 31 Okt, 16.10 WIB



BANDA ACEH -Perubahan sikap Politik Rocky Gerung yang selama ini dikenal lantang mengkritik pemerintah, mendadak menjadi sorotan setelah menjadi bagian Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Pengamat hukum dan kebijakan publik Muhammad Gumarang menilai posisi Rocky di lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk menguji konsistensi kritik dan pandangan politiknya selama ini.

Menurut Gumarang, perjalanan Rocky memperlihatkan dinamika dari pengamat yang kerap melontarkan kritik tajam terhadap penguasa hingga sosok yang kini disebut berada dalam lingkungan kekuasaan.

Ia menilai publik perlu mencermati apakah perubahan tersebut turut memengaruhi cara Rocky memandang kebijakan pemerintahan.

“Namun kritik Rocky Gerung masih dinilai masih batas wajar dan landai-landai saja, tidak sebrutal dengan Presiden ke-7 Jokowi,” kata Gumarang kepada wartawan, Sabtu 31 Oktober 2026.

Gumarang turut menyoroti pandangan Rocky mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia menyebut Rocky sebelumnya pernah mengkritik program tersebut, tetapi kemudian menyampaikan argumen yang mendukung keberlanjutannya. Perubahan pandangan itu, menurut Gumarang, perlu dilihat secara utuh untuk menilai konsistensi sikap politik Rocky.

“Diantaranya mengatakan bahwa MBG tidak bisa dibatalkan karena amanah konstitusi, ideolo-

gis dan menjalankan politik sosialis, MBG mencegah stunting anak,” kata Gumarang.

“Sikap ini banyak mendapat sorotan publik negatif, bahwa Rocky Gerung sudah menjadi juru bicara pemerintah sehingga banyak mendapat hujatan karena sikap yang dinilai tidak konsisten bahkan dinilai publik sebagai bentuk penghinaan,” tutur Gumarang.

Gumarang juga mengaitkan perjalanan politik Rocky dengan keterlibatannya dalam pendirian Partai Indonesia Baru pada 2002 dan Partai Serikat Rakyat Indonesia pada 2011.

Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa Rocky pernah terlibat dalam politik praktis, meskipun keterlibatan itu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya motif tertentu di balik kritik-kritiknya.

Gumarang mempertanyakan apakah Rocky akan tetap mempertahankan gagasan kritisnya setelah berada di lingkungan pemerintahan.

Ia mencontohkan sejumlah kebijakan yang diwarisi Prabowo dari pemerintahan sebelumnya, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), program MBG, dan kereta cepat Jakarta-Bandung.

“Bagaimana kita nilai nanti dengan adanya Rocky Gerung di istana, dapatkah minimal membawa orang-orang yang ia katakan separuh kabinet adalah dundu menjadi berkualitas, atau sebaliknya Rocky Gerung juga terpaksa menjadi ikut dundu atau bahkan menjadi raja dungunya,” pungkasnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Gibran Siap Buka-Bukaan di Sidang Ijazah PTUN: Tapi Penggugatnya Malah Cabut Gugatan

Oleh Redaksi · 30 Okt, 14.10 WIB

BANDA ACEH - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap membuka seluruh dokumen riwayat pendidikan jika diperlukan dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Diketahui, penggugat yakni Mercy telah mencabut gugatan terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran di PTUN.

Gibran mengatakan, seluruh proses hukum harus dihormati. Menurutnya, keputusan mengenai kelanjutan gugatan maupun pencabutannya sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim.

“Kita hormati seluruh proses peradilan yang ada di PTUN. Harapannya, seluruh proses dari awal sampai akhir ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan kejelasan kepada warga,” kata Gibran usai salat Jumat di Masjid Ar Ridho, Jelambar Utara, Jakarta, Jumat (30/11/2026).

Dia menegaskan, pengadilan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengungkap kebenaran. Selain itu, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Gibran juga menyatakan menghormati keputusan pihak penggu-

gat apabila memilih mencabut gugatan tersebut. Dia menyerahkan sepenuhnya proses selanjutnya kepada majelis hakim.

“Kita hormati keputusan dari penggugat yang mencabut gugatannya. Untuk proses selanjutnya, kami berikan sepenuhnya kepada Yang Mulia Hakim,” ujarnya.

Meski demikian, Gibran mengaku telah menyiapkan seluruh dokumen riwayat pendidikannya untuk keperluan sidang pembuktian. Dia bahkan menyatakan siap membuka dokumen tersebut secara transparan apabila dibutuhkan dalam persidangan.

“Kita sudah menyiapkan semua dokumen yang nanti disiapkan untuk sidang pembuktian. Dan kami juga siap untuk buka-bukaan. Ya, tapi mau gimana lagi, penggugatnya malah mencabut gugatannya,” katanya.

Gibran berharap proses hukum yang berjalan di PTUN Jakarta dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait polemik dokumen pendidikannya tersebut.

Sebelumnya diberitakan, gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA atau sederajat Wapres Gibran ...

NASIONAL

Pembalut Kena PPN 11 Persen Perlu Dikaji, PKB: Itu Kebutuhan Primer Bukan Gaya Hidup

Oleh Redaksi · 30 Okt, 14.17 WIB

BANDA ACEH - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta pemerintah mengkaji ulang wacana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen terhadap produk pembalut perempuan. Kebijakan ini dinilai kurang tepat karena pembalut bukan gaya hidup, melainkan kebutuhan primer.

Wakil Ketua Harian DPP PKB, Nadya Alfi Roihana mengatakan, pembalut adalah kebutuhan pokok perempuan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan biologis dan kesehatan reproduksi.

Sehingga, pemakaiannya tidak bisa dihindari.

“Pembalut itu kebutuhan primer perempuan. Bukan barang mewah, bukan gaya hidup, bukan produk yang bisa dipilih untuk dibeli atau tidak. Karena itu, pemerintah perlu mengkaji ulang pengenaan pajak 11 persen terhadap pembalut,” ujar Nadya di Jakarta, Jumat (30/10).

Mirisnya, di Indonesia masih ada perempuan yang belum bisa membeli pembalut secara layak. Kondisi ini bisa dijumpai di wilayah pinggiran atau pedesaan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

MA Batalkan Suket Ijazah Gibran, Hasto: Tidak Ada Kebohongan yang Abadi

Oleh Redaksi · 31 Okt, 12.16 WIB



BANDA ACEH - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. Hasto menilai putusan tersebut memperkuat persoalan pemenuhan syarat pendidikan yang sejak awal menjadi sorotan partainya.

Menurut Hasto, putusan MA membuktikan bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap, termasuk dalam persoalan yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

"Ya, ini kan juga membuktikan bahwa di dalam Politik itu tidak ada kebohongan yang abadi, terlebih ketika dilakukan melalui abuse of power. Di situlah kebenaran akan mencari jalannya sendiri,"

kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu (31/10/2026).

Dia mengatakan, putusan MA semakin memperkuat kritik yang selama ini disampaikan PDIP mengenai surat penyetaraan pendidikan Gibran. Hasto juga menyinggung keterangan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan tersebut.

"Sehingga dengan adanya keputusan dari Mahkamah Agung itu semakin memperkuat bahwa penyetaraan ijazah Gibran melalui surat keterangan yang di dalam sidang MK ternyata itu ijazahnya tidak ditemukan," ujarnya.

Hasto menilai persoalan tersebut menyangkut hal mendasar karena berkaitan dengan persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi.

"Nah, sehingga ini telah menyentuh hal yang sangat fundamental bahwa syarat yang ditetapkan oleh konstitusi setidaknya berijazah SMA atau sederajat itu tidak dipenuhi," ucapnya.

Dia kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Hasto juga menyinggung penggunaan bantuan sosial (bansos) pada akhir masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Ditambah juga dengan adanya upaya intervensi kekuasaan sehingga akhirnya Saudara Gibran bisa lolos sebagai calon wakil presiden, kemudian diikuti dengan abuse of power melalui bansos yang begitu besar yang menyebabkan fiskal pada masa Pak Prabowo

ini mengalami kesulitan, diikuti dengan pengerahan parok dan sebagainya. Kesemuanya melengkapi gambaran berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan ini," ucapnya.

Hasto meyakini berbagai persoalan tersebut akan mendapat koreksi dari masyarakat, termasuk melalui langkah politik dan proses lainnya. Dia menyebut masyarakat telah menyuarakan tuntutan agar dugaan pelanggaran etika, moral, dan konstitusi disikapi secara serius.

"Sehingga ini pasti akan dikoreksi oleh rakyat, termasuk partai politik, baik itu melalui cara-cara politik maupun melalui suatu proses, karena rakyat sudah ...

NASIONAL

Setelah MA Batalkan Suket Pendidikan Gibran, Desakan Mundur hingga Pemakzulan Menguat

Oleh Redaksi · 31 Okt, 12.19 WIB



BANDA ACEH - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka langsung memantik desakan agar Wakil Presiden tersebut mundur. Sejumlah tokoh bahkan meminta DPR mulai menempuh proses pemakzulan.

Desakan tersebut datang dari pakar hukum tata negara Denny Indrayana dan Feri Amsari, Direktur Eksekutif Lingkaran Madani Ray Rangkuti, serta advokat Ahmad Khozinudin.

Denny menilai putusan MA sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya menyinggung persoalan bukti pendidikan Gibran. Menurut dia, dua putusan tersebut menunjukkan adanya persoalan serius terkait syarat pendidikan Gibran saat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

"Jadi dua putusan Mahkamah ini sejalan menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan sebagai Wakil Presiden," katanya kepada media saat dihubungi, Jumat (30/10/2026) malam.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu pun meminta Gibran mundur. Ia menyebut pengunduran diri sebagai jalan terhormat agar polemik tersebut tidak terus berlarut.

"Karena itu, jalan terbaik bagi Gibran adalah mundur dan mundur adalah jalan terhormat. Dan mundur ini tidak menyandera Republik," ujarnya.

Ray Rangkuti juga meminta Gibran mundur. Ia menilai langkah tersebut diperlukan agar pole-

mik ini tidak berkembang menjadi kegaduhan Politik berkepanjangan.

Tak hanya itu, Ray mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan surat pembatalan pencalonan Gibran sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Menurut dia, KPU merupakan lembaga yang menerbitkan keputusan pencalonan Gibran.

"Saya berharap KPU segera menerbitkannya karena bagaimanapun surat yang mengatakan sah pertama kali Gibran sebagai calon wakil presiden itu adalah KPU. Berdasarkan keputusan MK maupun keputusan MA dengan sendirinya pencalonan itu harus dinyatakan tidak memenuhi syarat aliat TMS," tuturnya.

Ray juga meminta DPR menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Ia menilai partai politik di parlemen perlu mengambil tanggung jawab politik dan moral atas persoalan ini.

Desakan agar DPR bergerak turut disampaikan Ahmad Khozinudin. Ia meminta parlemen mengaktifkan hak menyatakan pendapat sebagai bagian dari proses pemakzulan Gibran.

"Sejalan dengan tuntutan kami sebelumnya, DPR ya harus mengaktifasi hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan Gibran sebagaimana dimaksud seperti pada Pasal 7A (UUD 1945) di mana Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya, salah satunya karena terbukti tidak memenuhi syarat," kata dia, dikutip Sabtu (31/10/2026).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



LINGKUNGAN

Banjir Rendam Aceh dan Sumut, Ribuan Warga Terdampak hingga 1.985 KK di Subulussalam

Oleh Van · 30 Okt, 23.16 WIB

SUMUT - Banjir melanda sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh serta Sumatera Utara.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan ribuan warga terdampak, dengan sejumlah rumah terendam dan akses jalan sempat lumpuh akibat genangan air.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan dikutip dari YouTube BNPB Indonesia Jumat, (30/10/2026) menyampaikan bahwa data dampak banjir di sejumlah wilayah tersebut berasal dari laporan kejadian pada 28 dan 29 Oktober 2026.

"Adapun dampak 691 KK di Kabupaten Langkat yang disebut

berikut merujuk pada laporan Rabu (28/10)," ujar Berton.

Di Sumatera Utara, banjir dilaporkan terjadi di Kabupaten Langkat, Mandailing Natal (Madina), Asahan, hingga Kota Medan.

Sementara di Aceh, genangan banjir melanda Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam.

Berdasarkan data BNPB, banjir di Kabupaten Langkat berdampak terhadap 691 kepala keluarga (KK).

Dampak tersebut merujuk pada laporan kejadian Rabu (28/10/2026).

Di Kabupaten Mandailing Natal, banjir menerjang Desa Binanga, Kecamatan Huta Bargot, dan Desa Rumbio, Kecamatan Panyabungan Utara.

Luapan Sungai Simalagi setelah hujan deras pada Rabu (28/10) menyebabkan 32 rumah terendam dan satu fasilitas ibadah terdampak.

Genangan air juga sempat membuat akses jalan tidak dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.

Namun, berdasarkan laporan BNPB, kondisi banjir berangsur surut dan jalan yang sebelumnya terendam kembali dapat dilalui.

Sementara itu, banjir di Kabupaten Asahan merendam Desa Sei Silau Tua dan Desa Bangun Sari, Kecamatan Setia Janji.

Sebanyak 3.610 jiwa terdampak, terdiri dari 2.910 jiwa di Desa Sei Silau Tua dan 700 jiwa di Desa Bangun Sari.

Ketinggian air di wilayah tersebut berkisar 30 hingga 80 sentimeter.

BNPB juga mencatat sebanyak 405 rumah terdampak serta dua fasilitas pendidikan dan akses jalan antardesa ikut terkena dampak.

Banjir turut terjadi di Kota Medan dan merendam permukiman warga, salah satunya di kawasan Kampung Aur.

Di Provinsi Aceh, banjir melanda Gampong Lhok Raya dan Gampong Cot Bayu, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan.

Hujan lebat pada Rabu (28/10) memicu luapan Sungai Lae Soraya dan Kruen Trumon Raya hingga menggenangi permukiman warga.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Denny Indrayana Sambangi PKS, Desak Parpol Mulai Proses Pemakzulan Gibran

Oleh Redaksi · 30 Okt, 11.00 WIB

BANDA ACEH - Denny Indrayana mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mendorong partai Politik di parlemen memulai proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kunjungan tersebut dilakukan setelah Denny mencabut gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan

memilih walkout dari persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Denny berharap partai politik, khususnya PKS, dapat mengambil inisiatif untuk membawa persoalan tersebut ke ranah politik dan konstitusional. Dia menilai PKS menjadi salah satu partai yang paling responsif terhadap persoalan yang dipersoalkannya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

MA Kabulkan Kasasi soal Suket Gibran, Demokrat hingga PDIP Layangkan Kritik

Oleh Redaksi · 31 Okt, 09.35 WIB



Wakil Presiden Republik Indonesia yang terhormat, Gibran Rakabuming Raka. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi terkait keabsahan surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali memanasakan polemik pendidikan Wakil Presiden tersebut.

Sejumlah tokoh Politik hingga akademisi menilai keputusan MA, bersama putusan Mahkamah Konstitusi (MK), harus menjadi perhatian serius negara.

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto dilindungi dari persoalan yang dinilainya sebagai skandal pelanggaran konstitusi.

Menurut dia, keputusan MK dan MA saling menguatkan terkait persyaratan pendidikan minimal SLTA saat Gibran mendaftar sebagai calon wakil presiden.

Dia menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh diwariskan dan

lembaga peradilan harus dijaga marwahnya, bukan dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak.

“Lebih mulia bagi negeri ini mencatatkan sejarah pernah ter-tipu oleh monster haus kekuasaan daripada bersikap permisif membiarkan keadaan ini terus berjalan. Lembaga negara MK dan MA harus dijaga marwahnya dan tidak dikorbankan demi kepentingan segelintir orang. Enough is enough!” ujar Syahrial, dikutip Sabtu (31/10/2026).

Sorotan serupa disampaikan kader PDI Perjuangan, Jhon Sitorus.

Dia menyebut kabar dikabulkannya kasasi oleh MA menjadi perkembangan penting dalam polemik dokumen pendidikan Gibran.

Menurut Jhon, berdasarkan pemberitahuan amar putusan yang diterima penggugat, MA menyata-

kan surat penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah.

Meski salinan lengkap putusan belum dipublikasikan, dia menilai keputusan tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan sepele.

“Berdasarkan pemberitahuan amar putusan yang diterima penggugat, MA mengabulkan kasasi dan menyatakan surat penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah. Meski salinan lengkap putusan masih menunggu dipublikasikan, ini bukan lagi persoalan sepele! Mistar +1,” kata Jhon.

Dia juga mengungkit putusan MK sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang membuktikan kelulusan setara SMA.

Jhon mempertanyakan sampai kapan publik harus menunggu

kejelasan mengenai dokumen pendidikan seorang wakil presiden.

Baginya, polemik tersebut bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut kejujuran, integritas, dan kehormatan jabatan publik.

“Lantas, berapa lama lagi publik harus disuguhi teka-teki tentang dokumen pendidikan seorang Wakil Presiden? Ini bukan sekadar persoalan selembar kertas. Ini menyangkut kejujuran, integritas, dan kehormatan sebuah jabatan yang menjadi representasi 290 juta rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Ia juga mempertanyakan bagaimana seorang pemimpin dapat berbicara tentang masa depan generasi muda ketika persoalan pembuktian riwayat pendidikannya sendiri masih menjadi kontroversi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Ade Darmawan Respons Putusan MA, Tegaskan Gibran Tetap Sah Jadi Wapres

Oleh Redaksi · 30 Okt, 19.41 WIB

BANDA ACEH - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Peradi Bersatu Ade Darmawan merespons putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak sah. Dia menyatakan putusan itu tidak berdampak hukum terhadap kedudukan Gibran sebagai wapres.

Ade mengatakan, pembatalan dokumen administratif tidak serta-merta menggugurkan hak konstitusional maupun tanggung jawab jabatan yang telah diemban Gibran.

"Kita ketahui semua bahwa apa pun terkait putusan itu tidak akan mempengaruhi jabatan wapres dalam hal ini. Dikarenakan bahwa putusan gugurnya satu surat tidak menggugurkan hak dan tanggung

jawab seorang wakil presiden," kata Ade dalam keterangannya, Jumat (30/10/2026).

Menurut Ade, legitimasi kemenangan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 telah diputuskan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menangani perselisihan hasil pemilihan umum.

"Hal ini hanya menjadi polemik di dalam kaitannya perdebatan yang terjadi. Tapi apa pun itu, kita berpegang cuma satu, yaitu pada putusan MK yang menyatakan bahwa pasangan calon Prabowo dan Gibran sah," ujarnya.

Dari perspektif hukum pidana maupun hukum tata negara, kata Ade, Indonesia menganut prinsip hukum tidak berlaku surut. Karena

itu, menurutnya, proses pemilihan yang telah selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat diulang begitu saja.

"Saya rasa ini hal yang biasa karena ini sudah lewat. Jadi kalau hal yang lewat, karena hukum kita tidak mengenal, hukum kita itu hanya mengenal tidak berlaku surut. Jadi dia tidak akan berlaku ke depan. Artinya, apa yang sudah terjadi tidak mungkin bisa diulang lagi," pungkasnya.

Diketahui, MA mengabulkan seluruh permohonan kasasi yang diajukan HM Subhan Palal terkait keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut diterbitkan melalui e-Court pada Jumat (30/10/2026) dengan nomor perkara 742 K/TUN/2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Kodam IM Sambut Kasdam Baru Brigjen TNI Ali Imran dengan Tradisi Peusijuek

Oleh Redaksi · 30 Okt, 17.12 WIB

BANDA ACEH, Banda Aceh – Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Kodam IM) menggelar tradisi penyambutan Brigadir Jenderal TNI Ali Imran sebagai Kepala Staf Kodam Iskandar Muda (Kasdam IM) di Markas Kodam Iskandar Muda (Makodam IM), Kota Jum'at (30/10/2026). Prosesi ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus bagian dari tradisi satuan dalam menyambut pejabat baru di lingkungan Kodam IM.

Rangkaian kegiatan diawali dengan prosesi tradisi peusijuek, sebuah kearifan lokal masyarakat Aceh yang sarat makna doa dan harapan akan keselamatan, keberkahan, serta kelancaran dalam mengemban amanah ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

MA Perkuat Putusan MK, PDIP Desak Gibran Segera Mundur!

Oleh Redaksi · 31 Okt, 12.10 WIB



BANDA ACEH -Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi perihal surat keterangan (Suket) penyetaraan sekolah menengah atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, memperkuat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira berpandangan bahwa jika penggunaan Suket penyetaraan ijazah setingkat SMA untuk pendaftaran Cawapres Gibran sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Maka, putra sulung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu jelas dianggap tidak mengantongi tanda kelulusan yang bisa disetarakan dengan ijazah.

“Sehingga dengan keputusan MA ini semakin mempertegas bahwa yang bersangkutan memang tidak mempunyai tanda kelulusan yang bisa disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia,” kata Andreas kepada wartawan, Sabtu, 31 Oktober 2026.

Atas dasar itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP ini sejak awal adanya putusan MK sudah meminta Gibran mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.

“Sudah sejak keputusan MK, saya pikir sebaiknya GGR (Gibran Rakabuming Raka) mundur,” pungkasnya.

Sebelumnya, MA mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742

K/TUN/2026 yang diajukan HM Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka.

Dalam petikan amar putusan yang dibacakan pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA menyatakan mengabulkan kasasi, membatalkan putusan judex facti, mengadili sendiri, serta mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

“Amar putusan: Kabul kasasi, batal putusan Judex factie, Adili Sendiri, Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya,” seperti tertulis pada petikan amar putusan yang dikutip beberapa saat lalu.

Sementara itu, dalam perkara PHPU Pilpres 2024, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum. Namun, dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan Gibran.

Sebelum putusan MA tersebut, Gibran juga menghadapi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagai calon wakil presiden. Namun, gugatan tersebut dicabut pada Kamis kemarin, 29 Oktober 2026

ACEH

Pemotor 17 Tahun Tewas dalam Kecelakaan di Aceh Barat

Oleh Aceh Barat · 30 Okt, 17.23 WIB

MEULABOH – Seorang pelajar berusia 17 tahun meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dan truk tangki di Jalan Meulaboh–Nagan Raya, Desa Peunaga Rayeuk, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Jumat (30/10/2026) sekitar pukul 11.30 WIB.

Korban berinisial R.F., warga Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, saat itu mengendarai sepeda motor Honda Vario berwarna hitam. Sementara truk tangki Hino tronton berwarna hijau dikemudikan Gunawan (35), warga Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

Berdasarkan keterangan saksi yang dihimpun petugas, kedua kendaraan melaju dari arah Nagan Raya menuju Meulaboh. Setibanya di lokasi kejadian, korban diduga berupaya mendahului truk dari sisi kanan.

Saat kedua kendaraan berada sejajar, setang kiri sepeda motor diduga bersenggolan dengan bagian samping kanan truk. Korban samudian kehilangan kendali dan terjatuh ke badan jalan hingga terlindas roda belakang kanan truk tangki.

Korban mengalami luka berat di bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, pengemudi truk dilaporkan tidak mengalami luka-luka.

Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto melalui Kasat Lantas AKP Eko Suhendro mengatakan, personel Satlantas telah mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan awal, memeriksa tempat kejadian perkara (TKP), serta mengumpulkan keterangan saksi. Kedua kendaraan juga telah diamankan sebagai barang bukti untuk kepentingan penanganan lebih lanjut.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

KPK Geledah Bea Cukai Semarang, Uang Tunai Disita

Oleh Redaksi · 31 Okt, 08.29 WIB



BANDA ACEH - Penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Bea Cukai Jawa Tengah kembali menghasilkan penyitaan barang bukti.

Kali ini, penyidik menyasar Kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah, Jumat (30/10/2026).

Dalam penggeledahan tersebut, KPK mengamankan sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, hingga uang tunai yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi di sektor cukai.

Penyitaan uang tunai menjadi salah satu temuan penting dalam kegiatan penyidikan tersebut. Namun, hingga penggeledahan berlangsung, jumlah pasti uang yang diamankan masih dalam proses penghitungan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan bukti

sekaligus memperkuat penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penerimaan negara dari sektor cukai.

Aktivitas penyidik KPK terlihat saat sejumlah petugas meninggalkan Kantor Bea Cukai Semarang dengan membawa dua koper dan dua kardus.

Salah satu kardus diketahui berisi dokumen yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

Selain dokumen, penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik serta sejumlah uang tunai. Seluruh barang yang disita akan diteliti lebih lanjut guna mengetahui keterkaitannya dengan perkara yang sedang ditangani.

KPK belum mengungkapkan nominal uang yang disita maupun rincian dokumen dan perangkat elektronik yang diamankan.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Sektor Cukai

Penyitaan uang tunai dalam penggeledahan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK menelusuri dugaan praktik korupsi di sektor cukai.

Penyidik tidak hanya mengumpulkan dokumen administratif, tetapi juga mengamankan bukti elektronik yang dapat membantu mengungkap komunikasi dan transaksi yang diduga berkaitan dengan perkara.

Budi Prasetyo menyampaikan bahwa seluruh barang bukti yang telah diamankan akan dianalisis lebih lanjut untuk memperkuat pembuktian.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap perkara secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterkaitan pihak-pihak lain.

Penggeledahan di Semarang bukan langkah yang berdiri sen-

diri. Sebelumnya, KPK juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Bea Cukai Kudus dan kantor PT Djarum di Jawa Tengah.

Rangkaian penggeledahan tersebut memperlihatkan perluasan langkah penyidikan KPK dalam mengusut dugaan korupsi sektor cukai yang melibatkan lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Dengan menyasar kantor pelayanan maupun kantor wilayah, penyidik berupaya mengumpulkan berbagai bukti yang diperlukan untuk membangun konstruksi perkara.

Hingga Jumat (30/10/2026), KPK belum mengumumkan secara terperinci jumlah uang tunai yang disita dari penggeledahan di Semarang maupun hasil ...

NASIONAL

Denny Indrayana: Modal Gibran Untuk Mundur, Tahu Diri dan Tahu Malu

Oleh Redaksi · 31 Okt, 19.34 WIB



BANDA ACEH - Eks Wamenkumham, sekaligus penggugat ijazah Wakil Presiden RI di Mahkamah Konstitusi (MK), Denny Indrayana menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya.

Hal itu dikatakan oleh Denny Indrayana pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan bahwa surat keterangan penyetaraan ijazah milik Gibran tidak sah.

"Apalagi dasar Saudara Gibran masih tanpa malu duduk sebagai Wakil Presiden. Untuk mundur, hanya 2 lagi modalnya, tahu diri dan tahu malu. Sdr Gibran bin Jokowi harus merenung, merefeksi karena surat keterangan (suket)nya pun sudah dibatalkan juga oleh MA," kata Denny dalam unggahan akun tiktok Arizona Siregar, Sabtu (31/10/2026).

PKS Dorong Pemimpin Dengan Kompetensi, Bukan Dispensasi

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzamil Yusuf, mengatakan, putusan MK terkait ijazah Gate dijadikan sebagai pintu gerbang untuk mengevaluasi pemilu kedepannya. Selain itu, PKS juga menghormati putusan lembaga negara yang final dan mengikat dan didalamnya jelas terselip satu persoalan yang sekarang rakyat banyak datang, protes, termasuk mendatangi kita, minta diselesaikan, diprooses lebih lanjut di DPR secara hukum dan konstitusional.

"PKS memandang polemik ijazah gate menyangkut rasa keadilan publik adanya perlakuan yang tidak sama dalam hukum dan pemerintahan. PKS siap menjadi jembatan bagi aspirasi publik, demokratisasi harus bergerak menuju meritokrasi, setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama memimpin dengan modal integritas dan kompetensi, bukan dispensasi," kata Almuzzamil Yusuf

NASIONAL

Penggugat Suket Ijazah Gibran Sebut Jabatan Wapres Kosong

Oleh Redaksi · 31 Okt, 08.20 WIB



Wakil Presiden Republik Indonesia, Yang Terhormat, Gibran Rakabuming Raka. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Penggugat Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah Gibran, Subhan Palal menyatakan, sejak putusan MA yang menyatakan Suket Penyetaraan ijazah Wapres Gibran tidak sah, maka jabatan Wakil Presiden saat ini sudah kosong.

"Jabatan Wakil Presiden saat ini sudah kosong," kata Subhan seperti yang dikutip dari TVOne, Sabtu (31/10/2026).

Hal senada juga dikatakan oleh Guru Besar Universitas Esa Unggul, Juanda.

Juanda menyebutkan, pasca putusan MA yang menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah milik Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka tidak sah, sudah seharusnya mundur dari jabatannya.

"Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wapres karena putu-

san MA berlaku sejak ditetapkan. Maka Gibran harus mundur," kata Juanda.

Ia juga meminta DPR RI agar segera merespon putusan Mahkamah Agung tersebut.

"DPR RI segera merespons putusan MA. DPR bisa menggunakan haknya, seperti Hak Angket sebagai fungsi pengawasan," kata Juanda.

Ketua Militan Gibran Se Indonesia, Gibran, Andi Azwan menyatakan, pihaknya masih menunggu hasil putusan MA secara lengkap.

"Saat ini kami menunggu putusan MA secara lengkap secara fisik, nanti kita akan kaji sehingga akan ada langkah selanjutnya. Yang pasti kami menghormati putusan MA," kata Azwan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Bupati Syech Muharram Saksikan Langsung Final Tilawatil Quran MTQ ke-35 Aceh Besar

Oleh Redaksi · 30 Okt, 22.17 WIB

BANDA ACEH, KOTA JANTHO – Bupati Aceh Besar H Muharram Idris menyaksikan langsung babak final cabang Tilawatil Quran golongan dewasa pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-35 Aceh Besar yang berlangsung di Kecamatan Kuta Baro, Kamis (29/10/2026) malam.

Kehadiran Syech Muharram ke arena MTQ tersebut merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap penguatan syiar Islam serta komitmen dalam membangun generasi Qur'ani yang berakhlak mulia dan mencintai Al-Qur'an.

Salah satu peserta yang tampil pada babak final tersebut adalah Radhi Ukhrawi. Ia bersama finalis

lainnya menunjukkan kemampuan terbaik dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an di hadapan dewan hakim dan masyarakat yang memadati arena perlombaan.

Suasana khidmat menyelimuti jalannya perlombaan ketika para finalis melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Keindahan irama, ketepatan tajwid, penguasaan lagu, serta ketepatan makhraj menjadi bagian penting dalam penampilan para peserta pada babak penentuan tersebut.

Babak final ini menjadi kesempatan bagi para qari untuk memperlihatkan hasil pembinaan dan latihan yang telah dijalani. Selain menjadi ajang kompetisi, MTQ juga menjadi sarana untuk

meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an sekaligus menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap kitab suci umat Islam tersebut.

Bupati Aceh Besar H Muharram Idris melalui kehadirannya memberikan perhatian terhadap keberlangsungan pembinaan qari dan qariah di daerah itu. Ia kegiatan MTQ tidak sekadar menjadi ajang meraih prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membudayakan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan MTQ ke-35 Aceh Besar di Kecamatan Kuta Baro juga menjadi momentum memperkuat ukhuwah Islamiah dan memperkuat silaturahmi antar masyarakat dari berbagai kecamatan dan

gampong. Semangat kebersamaan tersebut diharapkan terus terpelihara melalui berbagai kegiatan keagamaan.

"Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap penyelenggaraan MTQ ke-35 ini semakin memotivasi generasi muda Aceh Besar untuk mempelajari, mendalami, dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an," ujar Syech Muharram.

Dengan pembinaan yang berkesinambungan, para qari dan qariah diharapkan mampu meningkatkan kemampuan mereka serta terus mengharumkan nama daerah pada ajang MTQ di tingkat yang lebih tinggi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Dua Kali Mangkir dari KPK, Nusron Wahid Didesak Dicapot

Oleh Redaksi · 31 Okt, 08.25 WIB



Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyisakan satu agenda penting: meminta keterangan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

Persoalannya, Nusron tercatat dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, empat orang yang telah ditangkap KPK disebut sebagai orang kepercayaan sang menteri.

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana keterangan Nusron dibutuhkan untuk mengurai perkara yang berlangsung di lingkungan kementerian yang dipimpinnya.

Burhanuddin menilai KPK memiliki alasan kuat untuk meminta keterangan Nusron. Ia bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas terhadap menterinya. "Karena jangan lupa empat orang yang sudah ditangkap oleh KPK, KPK mengklaim sebagai tangan kanan atau kepercayaan Saudara Nusron," kata Burhanuddin dikutip Sabtu (31/10/2026).

Pernyataan tersebut menjadi sorotan di tengah proses penyidikan yang masih berjalan. Meski demikian, penyebutan empat orang sebagai kepercayaan Nusron tidak otomatis membuktikan keterlibatan sang menteri dalam tindak pidana yang sedang diselidiki.

Dua Kali Panggilan KPK Belum Terpenuhi

Catatan pemeriksaan menunjukkan Nusron tidak hadir ketika dipanggil sebagai saksi pada 7 Oktober 2026. KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada 15 Oktober 2026.

Namun, pada panggilan kedua tersebut, Nusron kembali tidak memenuhi agenda pemeriksaan.

Ketidakhadiran itu menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai perjalanan ke luar negeri. Pemeriksaan kedua sendiri merupakan penjadwalan ulang dari panggilan pertama yang tidak terlaksana.

Burhanuddin menilai ketidakhadiran berulang seorang pejabat negara dalam pemeriksaan penegak hukum dapat memberikan contoh buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Jadi satu hal yang buruk yang ditunjukkan oleh Menteri Pak

Prabowo dan Pak Prabowo harusnya mengambil langkah lebih tegas karena ini bukan sekali saja ya. Tegas dalam arti langsung mencopot seperti itu ya," kata Burhanuddin, Rabu (21/10/2026).

Burhanuddin tidak hanya meminta pencopotan Nusron. Ia juga mengusulkan agar Presiden Prabowo mempertimbangkan penonaktifan sementara apabila sang menteri kembali tidak memenuhi panggilan KPK.

"Tentu harapannya paling tidak misalnya ya kalau tidak bersedia untuk dipanggil sekali lagi, minimal dinonaktifkan dulu sebagai menteri ATR ya," ujarnya.

Desakan tersebut muncul karena perkara yang ditangani KPK berkaitan langsung dengan layanan pertanahan dan dugaan gratifikasi di lingkungan ATR/BPN.

NASIONAL

Jimly soal MA Batalkan Suket Ijazah SMA Gibran: Tanya Pimpinan Parpol di DPR, Maunya Gimana?

Oleh Redaksi · 31 Okt, 16.14 WIB



BANDA ACEH - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie merespons putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum.

Jimly menjelaskan, proses impeachment atau pemakzulan terhadap wapres yang sedang menjabat harus melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemudian Mahkamah Konstitusi (MK), dan dilanjutkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, proses tersebut tidak diperlukan apabila pihak terkait secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya.

"Kecuali jika yang bersangkutan secara sukarela mundur. Melalui proses impeachment, nanti akan ada pembuktian final lagi di MK mengenai ijazah dan sebagainya yang dinilai menjadi alasan untuk pemakzulan," kata Jimly saat dihubungi wartawan, Sabtu (31/10/2026).

Dia menambahkan, pengajuan permohonan pemakzulan harus memenuhi persyaratan konstitusional.

"Syaratnya permohonan harus diajukan oleh DPR atas persetujuan 2/3 x 2/3," sambungnya.

Jimly menilai, apabila DPR benar-benar mengajukan perkara tersebut ke MK, hal itu akan menjadi catatan sejarah. Sebab, MK belum pernah menangani perkara pemakzulan sebagai bagian dari kewenangan konstitusionalnya.

"9 Hakim MK pasti senang membuat sejarah karena selama ini belum pernah menangani perkara impeachment yang menjadi kewenangan konstitusionalnya," ujarnya.

Meski demikian, Jimly menyebut langkah Politik terkait pemakzulan tersebut bergantung pada sikap pimpinan partai politik (parpol) yang memiliki perwakilan di parlemen.

"Tinggal Anda tanya saja kepada pimpinan 8 parpol di Senayan, maunya bagaimana," ucapnya

EDUKASI

PCOH XII 2026 Sukses Digelar, Pelajar Aceh Unjuk Inovasi Sains dan Teknologi di FMIPA USK

Oleh Hamdani · 30 Okt, 20.54 WIB

BANDA ACEH – Himpunan Mahasiswa Fisika (HIMAFIS), Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Syiah Kuala (USK), sukses menggelar Physics Complex and Open House (PCOH) XII 2026. Ajang kompetisi sains dan teknologi bagi pelajar SMA/MA sederajat tersebut berlangsung selama dua hari, 26–27 Oktober 2026, di lingkungan FMIPA USK, Banda Aceh.

Kegiatan tahunan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas, mengasah kemampuan akademik, serta menunjukkan inovasi dan keterampilan di bidang sains dan teknologi.

Mengusung tema “Building Future Scientific Innovation Through Light and Optical Observation”, PCOH XII 2026 mengangkat peran cahaya dan observasi optik sebagai salah satu fondasi penting dalam pengembangan inovasi sains dan teknologi masa depan.

Ketua Departemen Fisika FMIPA USK, Dr. Saumi Syahreza, S.Si., M.Si., mengapresiasi konsistensi HIMAFIS dalam

menghadirkan kegiatan edukatif yang mampu mempertemukan dunia akademik dengan pelajar tingkat menengah.

Menurutnya, tema yang diangkat tahun ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan lebih dekat penerapan ilmu fisika, khususnya bidang optik dan cahaya, dalam berbagai perkembangan teknologi modern.

“Melalui tema tahun ini, kami ingin memperkenalkan lebih dekat bagaimana ilmu fisika, khususnya bidang optik dan cahaya, menjadi tulang punggung berbagai terobosan teknologi modern. Kami sangat bangga melihat antusiasme siswa-siswi yang hadir dan berkompetisi menunjukkan karya terbaiknya di FMIPA USK,” ujarnya.

Ketua Umum HIMAFIS FMIPA USK, Yudi Saputra, mengatakan PCOH XII dirancang tidak sekadar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan ilmu pengetahuan kepada generasi muda.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat mengubah pandangan pelajar terhadap fisika yang selama ini kerap dianggap sebagai mata pelajaran sulit dan kaku.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Pangdam IM Pimpin Sertijab Sejumlah Pejabat dan Alih Kodal Yonif TP 114/SM

Oleh Redaksi · 30 Okt, 19.25 WIB

BANDA ACEH, BANDA ACEH – Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Brigadir Jenderal TNI Mahesa Fitriadi, S.A.P., M.M., memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab), tradisi satuan pejabat Kodam Iskandar Muda, serta alih komando dan pengendalian (Kodal) Yonif TP 114/SM yang berlangsung di Jumat (30/10/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dinamika pembinaan organisasi dan personel TNI Angkatan Darat sekaligus menjadi momentum penting dalam memperkuat kesinambungan kepemimpinan, meningkatkan profesionalisme, serta memantapkan soliditas di lingkungan Kodam Iskandar Muda.

Dalam amanatnya, Pangdam IM menegaskan bahwa serah terima jabatan bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan bagian dari proses regenerasi kepemimpinan dan pembinaan personel guna meningkatkan kualitas serta efektivitas pelaksanaan tugas. Setiap jabatan, menurutnya, merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, loyalitas, integritas, dan profesionalisme.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam IM menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Brigjen TNI Ali Imran dan Kolonel Inf Teuku Mustafa Kamal atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama menjabat sebagai Danrindam Iskandar Muda dan Kapendam Iskandar Muda. Pang-

dam juga mengucapkan selamat atas kepercayaan yang diberikan kepada keduanya untuk mengemban amanah baru masing-masing sebagai Kasdam Iskandar Muda dan Danrem 011/Lilawangsa.

Pangdam berharap pengalaman, pengetahuan, serta berbagai kontribusi positif yang telah diberikan selama bertugas di Kodam Iskandar Muda dapat menjadi modal berharga dalam menjalankan tanggung jawab pada jabatan yang baru. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada istri masing-masing atas dukungan, doa, dan pendampingan yang selama ini diberikan dalam menunjang tugas serta pengabdian suami.

Selanjutnya, Pangdam IM menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas

kepada para pejabat yang menerima amanah baru, yakni Kolonel Kav Depri Rio Saransi, S.Sos., M.M., sebagai Kapok Sahli Pangdam Iskandar Muda; Kolonel Inf Amril Hairuman Tehupelasury, S.I.P., sebagai Danrindam Iskandar Muda; Kolonel Arh Yan Eka Putra, S.Sos., sebagai Kapendam Iskandar Muda; serta Kolonel Inf Adi Aradi, S.Pd., M.Pd., sebagai Pamen Ahli Bidang Jemen Sishan-neg Sahli Pangdam Iskandar Muda.

Kepada para pejabat baru, Pangdam menekankan agar segera beradaptasi dengan lingkungan tugas, memahami karakteristik dan kebutuhan satuan, serta melanjutkan program pembinaan yang telah berjalan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Komisi II DPR: Tidak Ada Perdebatan Lagi, Gibran harus Mundur!

Oleh Redaksi · 31 Okt, 07.53 WIB



BANDA ACEH -Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi gugatan surat keterangan (Suket) penyetaraan sekolah menengah atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Lewat amar putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan atau Suket penyetaraan SMA Gibran yang menjadi syarat pencalonannya di Pilpres 2024 tidak sah.

Anggota Komisi II DPR Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa putusan MA tersebut selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Dalam amar putusan itu, MK menyatakan permohonan para

Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SLTA atau sederajat.

“Dengan adanya Putusan MA ini maka secara hukum tidak ada ruang perdebatan lagi terkait tidak terpenuhinya syarat administratif pencalonan Giran Rakabuming sebagai Cawapres,” kata Deddy kepada wartawan, Jumat, 30 Oktober 2026.

Di sisi lain, Deddy menilai bahwa putusan MA tersebut memiliki konsekuensi moral dan etika. Oleh karenanya, ia menyarankan agar putra sulung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu segera mengundurkan diri dari jabatannya sangat Wakil Presiden.

“Gibran harus mundur dari posisi saat ini. Bertahan di posisinya setelah Putusan MK dan MK hanya akan menjadikan dia bahan tertawaan publik. Jadi saya mengusulkan agar Gibran secara ksatria dan terhormat mengundurkan diri,” kata politikus PDIP ini.

Selain itu, Deddy juga meminta Gibran untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo karena dianggap telah menjadi ‘noda’ bagi pemerintahan yang tengah berjalan saat ini.

“Paling penting adalah bagi Gibran untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, sebab telah menjadi cacat sejarah bagi negeri ini,” tegas Ketua DPP PDIP Bidang Pemilu ini.

Menurut Deddy, apabila Gibran tidak mau secara terhormat mengundurkan diri, sudah sepatutnya DPR menindaklanjuti putusan MK dan MA tersebut melalui proses yang diatur oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia.

“Bahkan jika perlu menelisik dugaan pidana dalam proses penerbitan Suket dan penyeludupan pasal dalam PKPU. Kedua peristiwa tersebut harus didalami agar terang benderang dan tidak terulang di masa depan,” pungkas eddy.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



EKONOMI

TP-PKK Sabang Apresiasi Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026, Perkuat Edukasi Cinta Rupiah

Oleh Redaksi · 30 Okt, 22.37 WIB

SABANG - Ketua TP-PKK Kota Sabang, Nuri Farisal, menyambut baik pelaksanaan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 di Kota Sabang yang digelar Bank Indonesia (BI) bersama TNI Angkatan Laut.

Kegiatan ini dinilai menjadi langkah penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah sekaligus memperluas akses layanan penukaran uang hingga wilayah kepulauan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Pulau Weh, Kantor Wali Kota Sabang, tersebut mencakup sosialisasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah serta layanan penukaran uang bagi masyarakat.

Nuri mengapresiasi inisiatif Bank Indonesia yang menghadir-

kan edukasi sekaligus layanan penukaran uang bagi masyarakat Sabang.

Menurutnya, pemahaman terhadap Rupiah perlu terus diperkuat karena mata uang nasional bukan sekadar alat pembayaran, tetapi juga menjadi simbol kedaulatan dan identitas bangsa yang mempersatukan masyarakat Indonesia.

“Karena itu, sudah sepatutnya kita memiliki rasa cinta, kebanggaan, dan pemahaman yang baik terhadap uang Rupiah. Masyarakat tidak hanya perlu mengenal Rupiah, tetapi juga harus mampu merawat, menggunakan, dan memperlakukannya dengan baik,” kata Nuri dalam keterangannya, Jumat (30/10/2026) sore.

Ketua TP-PKK Kota Sabang juga mengingatkan masyarakat untuk menerapkan prinsip 5J

dalam merawat uang Rupiah, yakni jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremas, jangan distapler, dan jangan dibasahi.

Kebiasaan sederhana tersebut merupakan bentuk kepedulian dalam menjaga kualitas uang Rupiah agar tetap layak digunakan sebagai alat transaksi.

“Bagi Sabang sebagai daerah kepulauan, ketersediaan uang Rupiah dan kemudahan layanan penukaran tentu sangat penting untuk mendukung aktivitas masyarakat, baik di sektor pariwisata, perdagangan, maupun UMKM. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak masyarakat, mulai dari generasi muda, pelajar, pelaku UMKM, hingga masyarakat di gampong,” tambahnya.

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 merupakan program Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut yang berlangsung pada 27 Oktober hingga 1 November 2026 dengan mengusung tema “Dari Belawan ke Pulau Sabang, Rupiah Terjaga Negara Berdaulat”.

Ekspedisi ini menjangkau sejumlah pulau, yakni Pulau Semabilan, Pulau Kampai, Pulau Pusong, hingga Pulau Sabang, sebagai upaya memastikan ketersediaan, kelancaran distribusi, dan kualitas Rupiah di wilayah kepulauan.

Pemimpin Rombongan Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026, Nampati Y. Ginting, menjelaskan bahwa Sabang menjadi salah satu wilayah tujuan ekspedisi yang dilaksanakan Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Hasto Ingatkan Kader PDIP Tak Boleh Takut Bela Rakyat

Oleh Redaksi · 31 Okt, 08.08 WIB



Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto. FOTO/Net.

BANDA ACEH - DPD PDIP Provinsi Lampung menggelar konsolidasi internal secara tertutup pada Jumat malam, 30 Oktober 2026.

Rapat dihadiri pengurus inti DPD dan DPC, ketua, sekretaris, bendahara, serta bidang pemenangan pemilu dan diisi arahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto membuka arahannya dengan menyampaikan salam dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Politikus asal Yogyakarta itu kemudian menegaskan empat sifat yang, menurutnya, harus melekat pada setiap kader. Berangkat dari perenungan Megawati, Hasto menyebut keyakinan sebagai pangkal dari segalanya.

“Keyakinan menghasilkan keteguhan, keberanian dan kesabaran,” kata Hasto.

Bagi Hasto, keberanian itu punya arah yang jelas: berpihak pada rakyat. Ia menyatakan kader PDI Perjuangan tidak boleh mundur ketika berhadapan dengan pihak yang menindas rakyat kecil.

“Kalau melihat rakyat tertindas, takut sama kriminalisasi pene-

gak hukum, jangan pernah menjadi kader PDI Perjuangan,” kata Hasto.

“Kalau keempat-empatnya ini menjadi satu, itu menjadi ‘Satyam Eva Jayate’, kebenaran akan menang,” sambungnya.

Lebih jauh, Hasto juga menyinggung cara PDI Perjuangan berpolitik. Menurutnya, pertarungan Politik harus dijalankan dengan gagasan dan kekuatan struktur partai, bukan dengan serangan yang menyasar pribadi.

“Jangan menyerang secara personal. Kita bertarung dari ide dan gagasan,” kata Hasto.

Ia menekankan pula prinsip kesetaraan yang menjadi pegangan partai.

“PDI Perjuangan sangat kokoh, kita tidak pernah membedakan seseorang dari suku, agama, status sosial, dan jenis kelamin,” kata Hasto.

Hadir pula anggota DPR Mukhlis Basri dan Ketut Suwendra, serta sejumlah kader muda DPP PDIP di antaranya M. Guntur Romli.

NASIONAL

Terjerat Kasus Korupsi, AKBP Edy Songkel Dicapot

Oleh Redaksi · 31 Okt, 08.01 WIB



BANDA ACEH -Polda Jawa Timur mencopot AKBP Edy Herwiyanto alias Edy Songkel dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan (Kabag Wassidik) Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO)

Pencopotan itu dilakukan menyusul pemeriksaan terhadap perwira menengah tersebut terkait dugaan kasus korupsi yang ditangani Divisi Propam Mabes Polri.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Jules Abraham Abast membenarkan adanya mutasi terhadap Edy.

“Yang bersangkutan dimutasikan dalam rangka pemeriksaan,” kata Jules saat dikonfirmasi pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Sayangnya, Jules tidak mengungkapkan secara terperinci

dugaan tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan Edy.

Pasalnya, pemeriksaan terhadap perwira tersebut bukan dilakukan oleh Polda Jawa Timur.

“Polda Jatim tidak dalam posisi untuk menyampaikan ataupun menyimpulkan materi maupun hasil pemeriksaan,” kata Jules.

Ia mengatakan Polda Jawa Timur menghormati proses pemeriksaan yang tengah berlangsung. Penjelasan mengenai substansi perkara maupun hasil pemeriksaan, menurutnya, menjadi kewenangan Divisi Propam Mabes Polri.

“Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai substansi maupun hasilnya tentunya menjadi kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan,” kata Jules

NASIONAL

Prabowo-Gibran-Jokowi dan Potensi Retaknya Dukungan Partai

Oleh Redaksi · 31 Okt, 07.58 WIB



Oleh:Selamat Ginting
Pendahuluan

KASUS Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak Politik yang semakin rumit setelah Mahkamah Konstitusi (MK), dalam putusan 6 Oktober 2026, menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Meskipun MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran karena persoalan kedudukan hukum para pemohon, pertimbangan hukum tersebut meninggalkan persoalan serius mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan seorang calon wakil presiden. Situasi ini menempatkan Presiden Prabowo Subianto pada persimpangan konstitusi dan politik.

Persoalannya bukan semata-mata apakah Prabowo akan tetap mempertahankan Gibran sebagai wakil presiden, melainkan apakah Prabowo bersedia mengambil jarak dari pengaruh politik Joko Widodo (Jokowi) ketika persoalan hukum yang menyangkut putra mantan presiden itu semakin mengemuka?

Di sinilah peta hubungan Jokowi dengan sejumlah partai politik menjadi relevan.

PDIP: Partai yang Memecat Jokowi dan Gibran

Hubungan Jokowi dengan PDIP berakhir dalam konflik politik yang terbuka. Pada 16 Desember 2024, DPP PDIP mengumumkan pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution dari keanggotaan partai.

Konflik tersebut tidak sekadar persoalan disiplin organisasi. Ada

perbedaan kepentingan politik yang semakin tajam menjelang dan setelah Pilpres 2024.

Bagi PDIP, persoalan Gibran dapat menjadi bagian dari evaluasi politik terhadap proses pencalonan wakil presiden pada 2024. Namun, sikap PDIP terhadap kasus tersebut tidak otomatis berarti partai itu akan mengambil posisi berseberangan dengan seluruh kebijakan pemerintahan Prabowo.

Justru di sinilah terdapat ruang politik bagi Prabowo untuk membangun hubungan dengan PDIP tanpa harus terikat pada kepentingan politik keluarga Jokowi.

Demokrat: Luka Politik dari Kasus Moeldoko

Partai Demokrat memiliki pengalaman konflik serius pada era pemerintahan Jokowi.

Pada 2021, Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Hari-

murti Yudhoyono (AHY) diguncang Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang mengangkat Moeldoko sebagai ketua umum. Saat itu Moeldoko menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

AHY menyebut peristiwa tersebut sebagai upaya pengambilalihan atau kudeta terhadap kepemimpinan Demokrat. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM akhirnya menolak mengesahkan kepengurusan hasil KLB tersebut.

Walaupun tudingan adanya operasi Istana tidak boleh dianggap sebagai fakta yang telah terbukti, peristiwa itu meninggalkan catatan politik dalam hubungan Demokrat dengan lingkungan kekuasaan era Jokowi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



SPORT

Marc Marquez Tercepat di Practice MotoGP Malaysia 2026, Bagnaia Terlempar dari 10 Besar

Oleh Redaksi · 30 Okt, 15.58 WIB

Marc Marquez berhasil mengungguli adiknya, Alex Marquez (Gresini Racing), yang menempati posisi kedua. Sementara itu, Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) melengkapi tiga besar dengan menempati peringkat ketiga.

Pedro Acosta (Red Bull KTM) berada di posisi keempat, disusul Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46) di urutan kelima.

Hasil tersebut memastikan 10 pebalap tercepat berhak melaju langsung ke sesi kualifikasi kedua (Q2). Sebaliknya, Francesco Bagnaia harus puas berada di luar 10 besar setelah mengalami kecelakaan menjelang berakhirnya sesi.

Persaingan di Sirkuit Sepang berlangsung sengit sejak awal practice. Marco Bezzechi (Apri-

lia) menjadi pebalap pertama yang mencatatkan waktu tercepat setelah lima menit sesi berjalan.

Namun, posisinya tidak bertahan lama setelah Johann Zarco (LCR Honda) mengambil alih pimpinan. Fabio Di Giannantonio kemudian menunjukkan kecepatannya dengan merebut posisi pertama pada menit kedelapan melalui catatan waktu 1 menit 57,982 detik.

Di Giannantonio saat itu unggul atas Alex Marquez dan Zarco yang berada di belakangnya.

Sementara persaingan di barisan depan berlangsung ketat, sejumlah pebalap mengalami insiden. Jack Miller (Prima Pramac Yamaha) terjatuh di tikungan keempat. Jorge Martin (Aprilia), yang sebe-

lumnya dinyatakan fit oleh tim medis, juga sempat kehilangan kendali di tikungan ke-12.

Marc Marquez sendiri sempat berada di posisi kesepuluh sebelum memperbaiki catatan waktunya dan naik ke urutan kedelapan. Namun, ia kemudian terjatuh di tikungan ke-15 sehingga harus kembali ke garasi.

Memasuki paruh akhir sesi, Di Giannantonio masih memimpin persaingan di depan Alex Marquez. Namun, perubahan posisi kembali terjadi setelah Diogo Moreira (Pro Honda LCR) tampil impresif dan merebut posisi teratas dengan catatan waktu 1 menit 57,913 detik.

Persaingan semakin menarik ketika Marc Marquez mulai

meningkatkan kecepatannya. Pebalap asal Spanyol itu akhirnya mengambil alih posisi pertama dengan torehan waktu 1 menit 57,000 detik.

Catatan tersebut sekaligus menempatkannya di puncak daftar pebalap tercepat, mengungguli para pesaingnya.

Maverick Vinales (KTM Tech3) sempat merangsek ke posisi kedua sebelum akhirnya digeser Pedro Acosta. Persaingan posisi kedua kemudian berlanjut ketika Alex Marquez berhasil menyalip Acosta pada lima menit terakhir sesi.

Nasib berbeda dialami Francesco Bagnaia. Pebalap Ducati Lenovo itu kesulitan mempertahankan posisinya ...

NASIONAL

Prabowo Sebut Korupsi Awal Kehancuran Bangsa, Singgung Bahaya Pemimpin Pintar Berhati Jahat

Oleh Redaksi · 31 Okt, 08.13 WIB



Presiden Prabowo Subianto. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto menegaskan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa.

Dia mengingatkan pentingnya mencetak pemimpin unggul yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati dan karakter yang baik.

Prabowo menyampaikan hal tersebut saat meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, Jumat (30/10/2026).

Dia menilai perilaku korupsi, penyelewengan, hingga penyalahgunaan wewenang dapat menjadi awal kehancuran sebuah negara.

"Korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan wewenang sesungguhnya adalah awal kehancuran bangsa," ujar Prabowo.

Menurut mantan Menteri Pertahanan tersebut, keberhasilan suatu bangsa tidak terlepas dari kualitas pemimpinnya.

Karena itu, proses seleksi calon pemimpin harus dilakukan secara baik dengan mempertimbangkan kecerdasan, kesehatan fisik, serta kualitas jiwa dan hati.

Prabowo mengingatkan, kecerdasan intelektual saja tidak cukup untuk menjadi seorang pemimpin.

Seseorang yang pintar tetapi memiliki niat buruk justru berpotensi membawa penderitaan dan ketidakadilan bagi masyarakat.

"Pemimpin yang unggul harus diseleksi yang baik. Seleksi yang baik, unggul, tidak unggul hanya otaknya. Unggul badannya. Unggul jiwanya. Unggul hatinya. Saudara-saudara orang pintar tapi hatinya jahat sangat berbahaya. Yang terjadi adalah penderitaan, ketidakadilan, bencana," ujar Prabowo.

Dia menjelaskan, SMA Taruna Nusantara dibentuk sebagai salah satu upaya menyiapkan calon pemimpin masa depan.

Sekolah tersebut diharapkan dapat menjaring anak-anak berprestasi dari berbagai latar belakang keluarga tanpa membedakan asal-usul mereka.

Prabowo mengibaratkan proses pencarian dan pembinaan calon pemimpin unggul seperti persiapan atlet yang akan mengikuti olimpiade.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia berkualitas di berbagai bidang untuk bersaing dan membawa kemajuan bangsa.

"Ini ibarat kita mau berhasil sebagai bangsa, kita perlu insinyur yang hebat, kita perlu ilmuwan yang hebat, kita perlu dokter-dokter yang hebat, kita perlu ahli-biologi yang hebat, kita perlu penemu-penemu teknologi yang hebat. Dari mana? Kita tidak bisa nunggu seolah-olah bibit-bibit itu akan jatuh dari pohon," ucapnya.

LIFESTYLE

8 Desa Wisata sebagai Destinasi Gathering dan Outing Karyawan yang Seru dan Berkesan!

Oleh Redaksi · 30 Okt, 19.11 WIB

Seharian bertemu rekan kerja, tapi obrolan tak jauh dari pekerjaan? Rapat beruntun dan tenggat padat membuat tim dekat secara jadwal, tapi renggang secara hubungan. Desa wisata bisa jadi jawabannya. Suasana berbeda dari kantor maupun ballroom hotel: peserta menyusuri kampung, mengenal tradisi warga, dan mencoba aktivitas kelompok di alam terbuka.

Artikel ini merangkum delapan desa wisata untuk gathering karyawan, dari Yogyakarta hingga Banyuwangi. Detail program rombongan tetap perlu dikonfirmasi ke pengelola.

Tanpa meja rapat dan notifikasi, rekan kerja lebih leluasa mengobrol. Aktivitas alam, budaya, dan keseharian warga juga membuka banyak pilihan wisata outbound karyawan. Gathering tidak otoma-

tis menaikkan produktivitas, tetapi kegiatan yang dirancang baik bisa memperkuat komunikasi tim. Pilih destinasi sesuai tujuan acara, jumlah peserta, akses, dan fasilitas agar tempat gathering perusahaan benar-benar pas.

Dusun Pentingsari berada di Desa Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, di kawasan Merapi. Desa ini diresmikan sebagai desa wisata pada 2008 dan meraih penghargaan desa wisata berkelanjutan 2020. Atraksi bertani, berkebun, dan homestay warga membuka peluang tim berbaur sambil mengerjakan sesuatu bersama. Jenis kegiatan perlu dikonfirmasi ke pengelola.

WisataHappy by Happy Tour ID bisa jadi opsi untuk acara serupa di Yogyakarta lewat paket gathering Jogja, dengan aktivitas ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Respons Ijazah Gibran, PDIP: Tidak Ada Kebohongan yang Abadi

Oleh Redaksi · 31 Okt, 08.05 WIB



Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan resminya, Jumat, 30 Oktober 2026. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan seluruh gugatan kasasi perihal ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka, memperkuat dalil bahwa syarat konstitusi bagi seorang calon presiden dan wakil presiden tidak dipenuhi.

"Dalam Politik itu tidak ada kebohongan yang abadi, terlebih ketika dilakukan melalui abuse of power. Disitulah kebenaran akan mencari jalannya sendiri," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan resminya, Jumat, 30 Oktober 2026.

Menurut Hasto, keputusan MA tersebut menegaskan persoalan yang sejak awal ia soroti.

"Sehingga dengan adanya keputusan dari Mahkamah Agung itu semakin memperkuat bahwa penyetaraan ijazah Gibran melalui surat keterangan yang di dalam sidang MK ternyata itu ijazahnya tidak ditemukan," kata Hasto.

Hasto menyebut persoalan ijazah menyentuh hal yang fundamental, karena menyangkut syarat yang ditetapkan konstitusi.

"Sehingga ini telah menyentuh hal yang sangat fundamental bahwa syarat yang ditetapkan oleh konstitusi setidak-tidaknya berijazah SMA atau sederajat itu tidak dipenuhi," kata Hasto.

Politikus asal Yogyakarta itu kemudian merangkai persoalan itu dengan dua hal lain: putusan Mah-

kamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran, dan pengerahan bantuan sosial pada akhir periode kedua Jokowi.

"Kesemuanya melengkapi gambaran berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan ini," sambungnya.

Bagi Hasto, rangkaian itu akan berujung pada koreksi. Ia menilai rakyat, termasuk partai politik, akan menyikapinya melalui cara-cara politik maupun melalui suatu proses.

"Sehingga ini pasti akan dikoreksi oleh rakyat, termasuk partai politik, baik itu melalui cara-cara politik maupun melalui suatu

proses," kata Doktor Universitas Pertahanan (UNHAN) ini.

Hasto pun merujuk dua kadernya yang telah menyerukan agar Gibran mundur, yakni Komarudin Watubun dan Andreas Hugo Pareira.

"Ini adalah suara dari begitu banyak rakyat yang makin besar. Suara ini enggak boleh diabaikan," kata Hasto.

Lebih jauh, soal apakah ada upaya PDIP mendorong Hak Angket di Senayan, Hasto menyebut langkah itu tidak bisa berjalan sendiri. Ia menyebut kekuatan partainya di parlemen.

"Ya, kita PDIP kan kekuatannya 18 persen sekian. Kami hanya punya 110 kursi," kata Hasto.

NASIONAL

Suket SMA Gibran Dibatalkan MA, Mahfud Serahkan Kelanjutan Jabatan Wapres ke Jalur Ini

Oleh Redaksi · 31 Okt, 00.51 WIB



BANDA ACEH - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko-polhukam) Mahfud MD menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA luar negeri milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. Mahfud menyerahkan tindak lanjut atas putusan tersebut kepada keputusan politik di DPR. Pasalnya, pemberhentian atau pemakzulan seorang wakil presiden yang telah dilantik tidak bisa dilakukan secara otomatis hanya berdasarkan putusan MA.

"Vonis MA yang membatalkan Suket Setara SMA untuk Gibran sudah jelas. Follow up atas jabatannya sebagai Wapres diserahkan kepada politik, mau pilih jalan yang mana," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Jumat (30/10). Namun tindakan oknum pejabat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menerbitkan dan meloloskan dokumen cacat hukum tersebut harus diseret ke ranah hukum pidana karena diduga

mengandung unsur pemalsuan data atau penyalahgunaan wewenang.

Meski demikian, Mahfud menilai tindakan oknum pejabat di KPU dan Kemendikbud yang menerbitkan serta meloloskan dokumen yang dinilai cacat hukum harus diproses melalui jalur pidana.

"TETAPI pembuatan Suket dan penyelundupan pasal 18 ayat (3) harus diproses secara pidana. KPU dan Dit. Dikdasmen seharusnya segera diperiksa," tegasnya.

Sebelumnya, melalui putusan kasasi yang dibacakan pada Jumat (30/10/2026), MA secara resmi menyatakan tidak sah Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Perkara tata usaha negara dengan nomor register 742 K/TUN/2026 yang diajukan oleh pemohon HM Subhan tersebut dikabulkan seluruhnya oleh majelis hakim MA.

Dalam amar putusannya, MA juga memerintahkan agar Suket penyetaraan yang dikuasai oleh pihak termohon ditarik untuk kemudian dimusnahkan.

OTOMOTIF

Suzuki NEX II, Motor Matic Irit dan Praktis untuk Aktivitas Harian hingga Ojol

Oleh Redaksi · 30 Okt, 18.53 WIB

Mobilitas sehari-hari membutuhkan kendaraan yang bukan hanya nyaman digunakan, tetapi juga hemat bahan bakar dan mudah dirawat. Apalagi bagi kamu yang setiap hari harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk bekerja, kuliah, menjalankan usaha, atau mencari penghasilan sebagai pengemudi ojek online (ojol). Karena itu, memilih motor matic irit menjadi salah satu pertimbangan penting agar pengeluaran transportasi tetap terkendali. Salah satu pilihan yang menarik untuk kebutuhan tersebut adalah Suzuki NEX II. Motor matic ini hadir dengan desain modern, mesin berkapasitas 113 cc, sistem bahan bakar Fuel Injection, serta teknologi Suzuki Eco Performance (SEP). Kombinasi tersebut mendukung efisiensi penggunaan bahan bakar sekaligus memberikan performa yang sesuai untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Selain menawarkan karakter berkendara yang praktis, Suzuki NEX II juga memiliki konstruksi

dan sistem pengoperasian yang dirancang untuk penggunaan harian. Dengan perawatan berkala sesuai rekomendasi pabrikan, pemilik kendaraan bisa menjaga performa mesin, memperpanjang usia pakai komponen, dan mendukung kenyamanan berkendara dalam jangka panjang.

Kendaraan harian idealnya memiliki karakter yang praktis, ekonomis, dan tidak merepotkan ketika digunakan. Suzuki NEX II menawarkan sejumlah karakteristik yang mendukung kebutuhan tersebut.

Salah satu daya tarik Suzuki NEX II adalah penggunaan teknologi Suzuki Eco Performance (SEP). Teknologi ini dikembangkan untuk mendukung keseimbangan antara performa mesin dan efisiensi bahan bakar. Suzuki NEX II menggunakan mesin 4 langkah, satu silinder, berpendingin udara dengan kapasitas 113 cc. Sistem bahan bakarnya sudah menggunakan Fuel Injection (FI), sehingga proses penyaluran bahan

bakar dilakukan secara elektronik sesuai kebutuhan kerja mesin.

Kombinasi tersebut membuat NEX II relevan bagi pengguna yang mengutamakan efisiensi dalam perjalanan sehari-hari. Terlebih, penghematan bahan bakar menjadi hal penting ketika kendaraan digunakan hampir setiap hari.

Namun, konsumsi BBM aktual tetap dipengaruhi beberapa faktor, seperti kondisi lalu lintas, beban kendaraan, tekanan ban, gaya berkendara, dan kondisi mesin.

Kemudahan mengendalikan kendaraan juga menjadi pertimbangan penting, khususnya ketika harus melewati jalanan perkotaan yang padat. Suzuki NEX II memiliki berat kosong sekitar 93 kg. Bobot tersebut mendukung karakter kendaraan yang praktis untuk bermanuver, berpindah jalur sesuai kondisi lalu lintas, dan digunakan dalam perjalanan sehari-hari.

ISLAM

Indonesia Model Dunia Moderasi Beragama, Mengenaskan!

Oleh Rut sw · 30 Okt, 17.00 WIB

EPULANG Menteri Agama Nasaruddin Umar dari pertemuan tokoh agama dunia, di Assisi, Italia, beliau membawa sejumlah peluang kerja sama internasional antara Kementerian Agama dan Masjid Istiqlal dengan sejumlah negara dan perguruan tinggi di Italia serta Vatikan, dari Inggris, Australia, dan Pakistan.

Bahkan, gagasan diplomasi keagamaan yang ia usung mendapat respons positif.

Ketertarikan tersebut menurut Nasaruddin, menunjukkan pengalaman Indonesia dalam mengelola keberagaman dan menjaga kehidupan beragama yang moderat semakin mendapat perhatian masyarakat internasional.

Terbukti ada dua perguruan tinggi yang ingin mempelajari pengalaman Indonesia dalam menjaga persatuan di tengah masyarakat yang majemuk.

Salah satunya adalah PISAI (Pontificio Istituto di Studi Arabi e d'Islamistica/Institut Kepausan untuk Studi Arab dan Islam) binaan Takhta Suci Vatikan.

Kerjasama ini dapat menjadi ruang pembelajaran bersama. Indonesia memiliki pengalaman dalam mengelola kemajemukan masyarakat, sementara Vatikan menyimpan kekayaan literatur dan tradisi keilmuan yang dapat menjadi sumber pembelajaran.

Selain itu, Nasaruddin mengatakan salah satu titik temu yang menghubungkan Indonesia dan Vatikan adalah komitmen untuk membela kelompok masyarakat yang mengalami penindasan tanpa membedakan latar belakang agama.

Kerjasama ini mengingatkan kita pada sisi kelam sejarah Islam di Indonesia akibat ulah seorang orientalis dan penasehat pemerintah Belanda, Christiaan Snouck Hurgronje.

Semula rakyat Aceh menerima dan menghormatinya karena keilmuan yang dimilikinya, namun berubah menjadi tokoh kontroversial hingga pengkhianat.

Snouck Hurgronje berpura-pura masuk Islam dan menggunakan nama samaran Abdul Ghaffar.

Ia bahkan tinggal di Mekkah pada tahun 1884–1885 untuk mempelajari jemaah haji asal Nusantara dan mengumpulkan informasi intelijen demi kepentingan pemerintah Belanda.

Ia merumuskan kebijakan agar pemerintah Belanda tidak membe-rangus Islam secara keseluruhan, melainkan membaginya menjadi dua: membolehkan ibadah ritual (Islam religius), tetapi menindak tegas segala bentuk Islam politik yang berpotensi melahirkan semangat perlawanan terhadap kolonialisme.

Inilah awal mula sikap sekuler dan moderasi beragama yang dikenalkan kepada kaum muslim dengan harapan Islam hancur demikian pula pemeluknya.

Kala itu, semangat mengusir penjajahan sangat masiv dan para ulama yang berdiri di garda terdepan.

Menyerukan jihad, tak hanya ingin menghapus penjajahan tapi juga menetapkan setiap bumi dipimpin syariat.

Bukan hukum kafir.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

MA Batalkan Suket Gibran, Mahfud MD Desak KPU dan Dikdasmen Diperiksa Pidana

Oleh Redaksi · 31 Okt, 00.58 WIB



BANDA ACEH - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum memunculkan desakan baru. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta dugaan pelanggaran dalam penerbitan dokumen tersebut ditindaklanjuti melalui proses pidana.

Mahfud bahkan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) segera diperiksa.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud melalui akun X pribadinya, @mohmahfudmd, Jumat

(30/10/2026), menyusul putusan kasasi MA yang mengabulkan gugatan pembatalan surat penyetaraan pendidikan Gibran.

Menurut Mahfud, persoalan keabsahan surat penyetaraan tersebut sudah mendapatkan kejelasan melalui putusan MA.

Namun, ia menilai masih ada persoalan lain yang harus ditindaklanjuti, terutama menyangkut proses penerbitan dokumen dan dugaan penyelundupan ketentuan dalam peraturan KPU.

"Vonis MA yg membatalkan Suket Setara SMA utk Gibran sdh jelas. Follow up atas jabatannya sbg Wapres terserah kpd politik, mau pilih jalan yang mana. TETAPI pembuatan Suket dan penyelundupan pasal 18 ayat (3) hrs diproses scr pidana. KPU dan

Dit. Dikdasmen seharusnya segera diperiksa," tulis Mahfud, Jumat.

Pernyataan Mahfud tersebut memuat dua persoalan berbeda.

Pertama, tindak lanjut politik atas posisi Gibran sebagai wakil presiden.

Kedua, dugaan persoalan pidana dalam proses penerbitan surat penyetaraan pendidikan yang digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.

Mahfud menyerahkan persoalan kelanjutan jabatan Gibran kepada mekanisme politik.

Namun, untuk dugaan pelanggaran dalam penerbitan surat penyetaraan, ia meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan.

NASIONAL

Anies Dikabarkan Ditawari Jadi Mendagri, Geisz Chalifa: Ngapain Masuk, Gaul sama Bahlil?

Oleh Redaksi · 31 Okt, 00.46 WIB



BANDA ACEH - Loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifa, menanggapi pernyataan Refly Harun mengenai kabar tawaran jabatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut untuk menggantikan Tito Karnavian. Refly mengungkapkan bahwa Anies disebut mendapat tawaran dari seseorang di lingkaran Istana Presiden. Bahkan, Refly mengaku diminta menyampaikan tawaran tersebut kepada Anies.

Menanggapi kabar itu, Geisz mempertanyakan alasan Anies harus bergabung ke dalam pemerintahan. Menurutnya, proses politik yang berlangsung sejak Pilpres 2019 sudah bermasalah.

"Sejak awal proses hasil Pilpres 2019 ini kan busuk, ngapain Anies masuk ke proses yang sudah kotor dari awal," kata Geisz saat menanggapi pertanyaan Refly Harun.

Geisz juga mengungkapkan bahwa Anies pernah mendapat tawaran jabatan Menteri Luar Negeri (Menlu) sebelum maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Tawaran tersebut, menurut Geisz, disampaikan dengan harapan Anies tidak mengikuti kontestasi Pilkada DKI.

"Saya tahu bahwa Anies pernah ditawari Menlu, sebelum Pilkada DKI, agar jangan maju di Pilkada DKI. Yang bertemu dengan Anies saya tahu, Anies sempat video call

dengan Pak Prabowo saya juga tahu," ujar Geisz.

Pernyataan Geisz itu turut menanggapi komentar Ketua Badan Pemenangan Nasional (Bakom) Syahganda Nainggolan yang sebelumnya menyebut Anies menawarkan jabatan agar bisa masuk ke Istana.

Geisz kembali mempertanyakan alasan Anies harus masuk ke lingkaran pemerintahan. Ia bahkan melontarkan sindiran dengan menyebut nama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

"Ngapain masuk ke dalam? Gaul ama Bahlil?" katanya.

ACEH

DKP Aceh Salurkan 64,95 Ton Bantuan Ikan di Aceh Selatan, Dukung Penanganan Stunting dan Pengendalian Inflasi

Oleh Hamdani · 30 Okt, 14.43 WIB

ACEH SELATAN – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh menyalurkan bantuan hasil perikanan sebanyak 64.950 kilogram atau 64,95 ton kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan, Rabu (28/10/2026). Bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh dalam meningkatkan konsumsi ikan, mendukung pemenuhan gizi masyarakat, sekaligus berkontribusi terhadap pengendalian inflasi daerah.

Penyaluran bantuan yang menjangkau masyarakat di 15 gampong tersebut turut menyasar wilayah lokus stunting sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan bergizi, khususnya sumber protein hewani bagi keluarga dan anak-anak.

Salah satu lokasi penyaluran berlangsung di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, dengan jumlah bantuan mencapai 4,1 ton hasil perikanan.

Dalam kegiatan tersebut, DKP Aceh diwakili Kasubkoordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), Fitriani, S.Pi., M.Si., bersama tim. Penyaluran

juga melibatkan Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kabupaten Aceh Selatan, Ny. Nafisah Mirwan, MS., yang turun langsung bersama unsur terkait untuk memastikan bantuan diterima masyarakat sasaran.

Fitriani menyampaikan bahwa penyaluran bantuan hasil perikanan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Aceh melalui DKP Aceh dalam mendorong peningkatan konsumsi ikan sekaligus membantu masyarakat memperoleh akses terhadap pangan bergizi.

Menurutnya, bantuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat di wilayah lokus stunting, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam mendukung pengendalian inflasi daerah.

"Ikan merupakan sumber protein hewani yang memiliki nilai gizi tinggi dan sangat penting bagi pertumbuhan anak serta kesehatan keluarga. Melalui penyaluran bantuan ini, kami berharap masyarakat dapat terbantu dalam memenu-

hi kebutuhan pangan bergizi, sekaligus semakin terdorong untuk menjadikan ikan sebagai bagian dari konsumsi sehari-hari," ujarnya.

Ia menjelaskan, dari perspektif pengendalian inflasi daerah, penyaluran bantuan hasil perikanan diharapkan dapat membantu meringankan pengeluaran rumah tangga, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk dukungan sektor perikanan terhadap upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama dalam menjaga keterjangkauan dan akses masyarakat terhadap bahan pangan sumber protein.

Dengan demikian, pemanfaatan hasil perikanan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumsi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan rumah tangga dan mendukung stabilitas ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Ketua FORIKAN Kabupaten Aceh Selatan, Ny.

ACEH

Kabid GTK: Akhlak Lebih dari Sekadar Prestasi

Oleh Aceh Barat · 30 Okt, 11.59 WIB



Momen kebersamaan guru dan siswa pada acara silaturahmi di SMP 1 Woybar, FOTO/fst

MEULABOH — Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (Kabid GTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, H. Faisal, S.Pd., bersilaturahmi dengan kepala sekolah, guru, serta siswasiswi SMP Negeri 1 Woyla Barat dalam kegiatan pembacaan Surah Yasin dan Jumat Amal, Jumat (30/10/26).

Dalam kesempatan tersebut, H. Faisal mengingatkan para siswa bahwa prestasi tidak hanya diukur dari keberhasilan meraih juara, tetapi juga dari akhlak, sopan santun, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama.

"Prestasi bukan hanya tentang mendapatkan juara, tetapi juga tentang akhlak yang baik, sopan

santun, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama," pesannya.

Usai kegiatan, H. Faisal turut duduk bersama kepala sekolah dan para guru untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan pentingnya kolaborasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Barat.

Menurutnya, kepala sekolah yang mampu menggerakkan guru, serta guru yang dapat menginspirasi siswa, menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

"Kepala sekolah yang hebat mampu menggerakkan guru, guru yang hebat mampu menginspirasi siswa, dan kerja sama yang kuat

akan melahirkan pendidikan yang bermutu," ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh warga sekolah untuk memulai perubahan positif dari diri sendiri.

"Jangan menunggu sekolah menjadi baik, tetapi mulailah dari diri kita sendiri untuk menjadikan sekolah lebih baik," tegas H. Faisal.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan nilai-nilai religius, pembentukan karakter, dan semangat kebersamaan semakin tumbuh di lingkungan SMP Negeri 1 Woyla Barat guna mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Barat, tutupnya.[]

Editor : Biro Meulaboh.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Hujan Deras dengan Intensitas Tinggi, Sejumlah Wilayah di Aceh Diterjang Banjir

Oleh Van · 31 Okt, 17.27 WIB



Kondisi memprihatinkan jembatan yang hancur akibat terjangan arus sungai yang deras.

ACEH — Sejumlah wilayah di Aceh Selatan kini tengah menghadapi bencana banjir usai hujan dengan intensitas tinggi.

Banjir melanda Gampong Lhok Raya, Kecamatan Trumon Tengah itu memiliki ketinggian air beragam, mulai dari 20 centimeter hingga 50 centimeter, sehingga membuat sebagian rumah terdampak dan membuat warga harus mengungsi.

Menurut catatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Selatan menyebutkan sebanyak 112 jiwa warga Gampong Cot Bayu dan Gampong Lhok Raya, Kecamatan Trumon Tengah kini mengungsi akibat banjir.

“Kami meninjau beberapa titik banjir di Kecamatan Trumon

Tengah serta membaca semua laporan, sehingga kami tetapkan status tanggap darurat banjir,” kata Bupati Aceh Mirwan MS kepada wartawan di Aceh Selatan pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Status tanggap darurat tersebut akan berlaku selama 14 hari menyusul banjir yang terjadi.

“Saya sudah menginstruksikan seluruh jajaran dan satuan tugas penanggulangan bencana untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan,” imbuhnya.

Selain di Aceh Selatan, Aceh Tenggara juga mengalami banjir hingga membuat jembatan di Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam putus total.

Dalam video viral di media sosial, tampak akses jembatan putus karena terjangan banjir.

“Pagi ini, Sabtu, 31 Oktober 2026 jembatan di Desa Mbarung putus karena terjangan banjir dan luapan dari Sungai Lawe Atas,” tulis keterangan dalam unggahan akun Threads @zumaahmd pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Masih di Aceh Tenggara, Humas Polres Karo mengabarkan bahwa terjadi longsoran yang menutup Jalan Nasional Kabanjahe-Aceh Tenggara pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Longsoran tersebut terjadi karena hujan deras turun di wilayah Kecamatan Laubaleng.

“Materi longsor menutupi badan jalan, sehingga arus lalu lintas dari kedua arah tidak dapat dilalui kendaraan,” ungkap pihak Polres Karo pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Kemudian Gayo Lues juga sempat diterjang banjir dan angin puting beliung pada 28 Oktober 2026.

Derasnya hujan membuat Daerah Aliran Sungai (DAS) Dedep tak mampu menampung debit air hingga membuat sungai meluap.

Dalam salah satu video yang viral di media sosial, terlihat air berwarna coklat keruh dengan arus kuat membanjiri area permukiman warga.

“Mohon doanya, Gayo Lues, Aceh tepat nya di Kampung Badak kembali banjir,” tulis unggahan dalam akun Threads @whikidd pada Rabu, 28 Oktober 2026 lalu.

ACEH

Pemkab Aceh Barat Dampingi Korban Perundungan

Oleh Aceh Barat · 31 Okt, 16.53 WIB



Situasi di dalam kantor DP3KAB saat proses administrasi atau pemeriksaan berlangsung. FOTO/ist

MEULABOH — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) bersama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memberikan pendampingan kepada anak korban dugaan kekerasan dan perundungan yang menjadi perhatian publik.

Kepala DP3AKB Aceh Barat, Mulyani, mengatakan pendampingan dilakukan untuk memastikan hak-hak anak terlindungi selama proses hukum serta mendapatkan layanan pemulihan yang dibutuhkan.

“Kami telah mendampingi anak korban saat menjalani pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP) di Polres Aceh Barat,” kata Mulyani, Sabtu (31/10/2026).

Selain pendampingan hukum, Pemkab Aceh Barat akan memfasilitasi penggantian biaya visum yang sebelumnya dibayarkan orang tua korban. UPTD PPA

juga menyiapkan pendampingan psikologis guna membantu pemulihan kondisi emosional anak.

Mulyani menegaskan, penanganan kasus kekerasan terhadap anak harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum.

Ia juga mengimbau masyarakat tidak menyebarkan identitas, foto, video, maupun informasi pribadi korban yang dapat memicu stigma dan trauma baru.

“Serahkan penanganan kasus ini kepada pihak berwenang dan bersama-sama membangun lingkungan yang aman, ramah anak, serta bebas dari kekerasan,” ujarnya.

Pemkab Aceh Barat telah menyerahkan laporan terkait kasus tersebut kepada Unit PPA Polres Aceh Barat. Menurut Mulyani, Kanit PPA Polres Aceh Barat telah membenarkan penerimaan laporan itu.[]

Editor : Biro Meulaboh.

HIBURAN

Mahasiswa Palsu Ditangkap Ormawa Undira, Ngaku Dibayar Ikut Aksi Sumpah Pemuda Bareng Raffi Ahmad dan Willie Salim di Bundaran HI

Oleh Redaksi · 30 Okt, 09.58 WIB

BANDA ACEH -Seorang pria yang mengenakan jaket almamater Universitas Dian Nusantara (Undira) dan mengikuti kegiatan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di BUndaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta Pusat pada hari Kamis, 29 Oktober 2026 berdasarkan undangan dari Komunitas dan saya dibayar,” kata Bayu, Kamis (29/10/2026) malam.

Lantas mengapa dirinya bisa sampai bisa mengenakan jaket almamater tersebut, Bayu mengaku bahwa dirinya hanya diberikan saat mengikuti aksi itu tanpa ia mengetahui asal usulnya. “Mengenai almamater yang saya kenakan itu diberikan kepada saya tanpa saya ketahui asal usulnya,” ujarnya.

Atas kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pelurusan informasi, Bayu menyampaikan ucapan terima kasih kepada organisasi kemahasiswaan Undira. “Saya berterima kasih kepada rekan-rekan ormawa Undira yang memberikan saya kesempatan klarifikasi saya tanpa ...

“Saya Bayu Setiadi alias Dino, saya adalah orang yang ada di video ini. Saya di sini berhak mengklarifikasi bahwa saya bukan mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Saya mengikuti acara deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI pada 29 Oktober 2026 berdasarkan undangan dari Komunitas dan saya dibayar,” kata Bayu, Kamis (29/10/2026) malam.

Lantas mengapa dirinya bisa sampai bisa mengenakan jaket almamater tersebut, Bayu mengaku bahwa dirinya hanya diberikan saat mengikuti aksi itu tanpa ia mengetahui asal usulnya.

“Mengenai almamater yang saya kenakan itu diberikan kepada saya tanpa saya ketahui asal usulnya,” ujarnya.

Atas kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pelurusan informasi, Bayu menyampaikan ucapan terima kasih kepada organisasi kemahasiswaan Undira.

“Saya berterima kasih kepada rekan-rekan ormawa Undira yang memberikan saya kesempatan klarifikasi saya tanpa ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Wali Kota Sabang dan Ketua TP-PKK Salurkan Bantuan untuk Warga Membutuhkan

Oleh Redaksi · 30 Okt, 10.23 WIB

BANDA ACEH, SABANG — Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam bersama Ketua TP-PKK Kota Sabang, Nuri Farisal, mengunjungi Siti Rohamah, warga Jurong Keramat, Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kamis (29/10/2026) sore. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi keluarga sekaligus menyerahkan bantuan guna meringankan beban kebutuhan hidupnya.

Kedatangan Wali Kota Sabang bersama Ketua TP-PKK dan Kepala Dinas Sosial, Pemberda-

yaan Masyarakat dan Gampong, PP dan PA Kota Sabang, Iswandi, disambut Keuchik Gampong Kuta Timu, Tesar Heryadi, beserta perangkat gampong.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli H. Adam melihat langsung kondisi keluarga Siti Rohamah yang selama ini berjuang memenuhi kebutuhan hidup di tengah keterbatasan ekonomi.

Sehari-hari, Siti Rohamah bekerja mencuci pakaian milik orang lain untuk mencari nafkah. Di tengah kesibukannya bekerja,

ia juga harus mengasuh anaknya yang berstatus yatim.

Pekerjaan tersebut menjadi sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena itu, dukungan terhadap keberlangsungan pekerjaannya turut menjadi perhatian dalam penyaluran bantuan.

Wali Kota Sabang kemudian menyerahkan bantuan berupa uang tunai dan sejumlah kebutuhan lainnya. Bantuan dana juga diberikan untuk mendukung penyediaan peralatan mencuci yang digunakan Siti Rohamah dalam bekerja,

sehingga ia dapat terus menjalankan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Kami berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan beban keluarga Ibu Siti Rohamah. Semoga bantuan ini juga bisa mendukung beliau untuk terus bekerja dan memenuhi kebutuhan anaknya,” harap Zulkifli.

Selain menyerahkan bantuan, kunjungan tersebut juga menjadi bentuk perhatian Pemerintah Kota Sabang terhadap kondisi keluarga Siti Rohamah.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Bukan Sekadar Juara, MTQ ke-35 Aceh Besar Tinggalkan Kesan Mendalam bagi Peserta

Oleh Redaksi · 31 Okt, 15.02 WIB



BANDA ACEH, KOTA JANTHO – Malam penutupan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-35 tingkat Kabupaten Aceh Besar menjadi momen membahagiakan bagi para peserta yang berhasil meraih prestasi di masing-masing cabang perlombaan. Di balik pencapaian tersebut, tersimpan berbagai pengalaman, perjuangan, dan kesan tersendiri selama mengikuti ajang keagamaan yang berlangsung di Lapangan Kemukiman Bung Cala, Kecamatan Kuta Baro, Jumat (30/10/2026).

Bagi para peserta, keberhasilan meraih juara bukan sekadar tentang kemenangan, tetapi juga menjadi pengalaman yang membanggakan dan berkesan. Ajang tersebut memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertemu dengan peserta lain sekaligus

menunjukkan kemampuan terbaik dalam bidang Al-Qur'an.

Salah satu pengalaman tersebut dirasakan Razi Ukhrawi dari Kecamatan Krueng Barona Jaya yang berhasil meraih Juara I pada cabang Tilawah Dewasa Putra. Ia mengaku bersyukur dan bangga atas pencapaian tersebut.

Menurutnya, suasana perlombaan memberikan pengalaman berharga, terutama ketika berhadapan dengan peserta lain yang memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik.

"Perasaannya tentu sangat senang dan bersyukur. Apalagi bisa bertemu dengan banyak peserta yang memiliki kemampuan luar biasa. Ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya, sekaligus motivasi untuk terus memperbaiki bacaan

dan meningkatkan kemampuan," ungkap Razi.

Kesan serupa juga dirasakan Cut Raisatul Haq dari Kecamatan Kota Jantho yang berhasil meraih Juara III pada cabang Tilawah Remaja Putri. Ia mengatakan, mengikuti MTQ ke-35 menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus menantang.

Selain mempersiapkan diri untuk tampil, ia juga mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman baru selama mengikuti perlombaan.

"Bagi saya, MTQ ini sangat berkesan. Ada rasa gugup saat tampil, tetapi juga ada kebahagiaan karena bisa mengikuti perlombaan dan bertemu teman-teman dari berbagai daerah. Alhamdulillah, bisa mendapatkan hasil yang baik menjadi kebahagiaan tersendiri," kata Cut Raisatul Haq.

Sementara itu, Dafiqi Rahmat dari Kecamatan Mesjid Raya, peserta cabang Tilawah Golongan Tunanetra Putra, mengaku sangat terharu dan bersyukur dapat mengikuti MTQ ke-35 Kabupaten Aceh Besar.

Ia menyampaikan bahwa pencapaian dan pengalamannya selama mengikuti perlombaan tidak terlepas dari doa serta dukungan kedua orang tua, sahabat, tim ofisial, dan para pendamping yang telah membantu seluruh peserta selama kegiatan berlangsung.

"Masyaallah, tabarakallah, saya sangat terharu. Alhamdulillah, berkat doa kedua orang tua, dukungan sahabat-sahabat, tim official, para pendamping, serta semua pihak yang telah membantu dan mendampingi kami selama perlombaan ...

ACEH

Sekda Kurdi Raih JAB Award 2026 atas Inovasi Birokrasi

Oleh Aceh Barat · 31 Okt, 16.35 WIB



Ketua JAB, Chaidir Azhar, menyerahkan penghargaan JAB Award 2026 kepada Sekda Aceh Barat, Dr. Kurdi.FOTO/fist

MEULABOH - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Barat, Dr. Ir. Kurdi, ST., MT., MH., IPM., ASEAN Eng., meraih penghargaan JAB Award 2026 kategori Tokoh Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Jurnalis Aceh Barat (JAB), Chaidir Azhar, kepada Kurdi dalam malam puncak JAB Award 2026 di Aula Teuku Umar, Bapperida Aceh Barat, Jumat (30/10/2026) malam.

Kurdi dinilai berkontribusi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN), serta mendorong inovasi administrasi birokrasi dan percepatan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat.

Selama berkarier sebagai ASN, Kurdi juga dikenal mengembangkan berbagai inovasi untuk

meningkatkan efektivitas administrasi pemerintahan dan mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.

Usai menerima penghargaan, Kurdi menyampaikan apresiasi kepada JAB atas pengakuan tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan itu merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Menurutnya, sinergi dan komitmen aparat pemerintah menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendorong kemajuan daerah.

Kurdi turut mendedikasikan penghargaan tersebut kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Aceh Barat yang selama ini bekerja mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.[]

Editor : Biro Meulaboh.

EKONOMI

Bahlil Curiga Singapura Jual Lagi Pasokan Gas RI ke Luar Negeri

Oleh Redaksi · 30 Okt, 09.45 WIB



BANDA ACEH -Pasokan Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair Indonesia ke Singapura diduga tidak seluruhnya berakhir sebagai konsumsi domestik, melainkan dijual kembali ke negara lain.

Dalam sebuah pernyataan di Istana Kepresidenan Jakarta, Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengungkap Indonesia selama ini telah mengirimin 148 kargo LNG ke Singapura.

Namun, ia meyakini tidak seluruh pasokan tersebut dimanfaatkan untuk konsumsi dalam negeri Singapura, melainkan ada yang dijadikan komoditas perdagangan.

"Keyakinan saya bahwa pengiriman 148 kargo itu tidak semuanya itu dipakai untuk kepentingan Singapura, tapi sebagian dijadikan sebagai trading untuk kemudian diekspor lagi ke negara lain. Tapi ada sebagian pasti untuk konsumsi

mereka," kata Bahlil, dikutip Jumat, 30 Oktober 2026.

Selain LNG, Indonesia juga memasok gas melalui jaringan pipa dari Natuna dan daratan Sumatera. Total pasokan gas pipa yang dikirimkan ke Singapura mencapai 409,5 MM.

Saat ini, pemerintah mulai mengurangi sebagian pasokan tersebut sebesar 31 MM dari total 409 MM berdasarkan kontrak yang berlaku.

Bahlil menegaskan, kebijakan pengurangan pasokan itu belum melanggar perjanjian karena volume yang dikirimkan masih berada di atas batas minimum kontrak.

"Dengan yang ada itu, kita belum melanggar kontrak karena ada batas minimum, kan? Batas minimum itu belum kita lampau. Jadi nggak ada masalah, ya," tegasnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



LINGKUNGAN

Kasus Hutan Aceh Singkil: Publik Ragukan Konsistensi Aparat

Oleh Ahmad Fadhli · 30 Okt, 10.30 WIB

ACEH SINGKIL — Penanganan perkara dugaan perusakan kawasan hutan di Kabupaten Aceh Singkil kembali menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya mendapat perhatian dalam Rapat Koordinasi Lembaga Wali Nangroe dan diberitakan sejumlah media, kini muncul pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum, status alat berat yang diduga berkaitan dengan perkara, serta dugaan kejanggalan dalam penanganan pihak yang diduga bertanggung jawab.

Sorotan ini bukan karena perkara tersebut tidak berjalan, melainkan karena proses penanganannya dinilai perlu memperoleh penjelasan yang lebih terbuka. Berdasarkan informasi yang

disampaikan narasumber, berkas perkara dugaan perusakan kawasan hutan yang dilaporkan sejak 17 April 2025 dan ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 24 Agustus 2026 masih berstatus P-19 hingga Senin, 26 Oktober 2026.

Status P-19 menunjukkan bahwa penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai petunjuk yang diberikan. Oleh karena itu, perkembangan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dijelaskan kepada publik, terutama mengenai kelengkapan pembuktian dan tindak lanjut penyidik atas petunjuk jaksa.

Narasumber mempertanyakan perbedaan langkah penanganan antara perkara dugaan perusakan

kawasan hutan yang diduga menggunakan alat berat jenis excavator dan perkara lain terkait kendaraan pengangkut kayu yang diduga berasal dari kawasan hutan.

Menurut keterangan narasumber, dalam perkara pengangkutan kayu tersebut, aparat kepolisian melakukan penindakan dalam waktu sekitar 2 x 24 jam, mengamankan terduga pelaku, menetapkannya sebagai tersangka, serta mengamankan dan menyita kendaraan beserta kayu yang dijadikan barang bukti.

Sementara itu, dalam perkara dugaan perusakan kawasan hutan yang melibatkan penggunaan excavator, penanganannya telah berlangsung sejak laporan dibuat pada April 2025. Hingga 26 Okto-

ber 2026, menurut informasi yang diterima redaksi, berkas perkara masih berstatus P-19.

Perbedaan perkembangan kedua perkara tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar hukum dan pertimbangan penyidik dalam mengambil tindakan. Apakah perbedaan itu disebabkan oleh karakteristik perkara, kecukupan alat bukti, perbedaan unsur tindak pidana, atau faktor lain yang dapat dijelaskan secara objektif?

Perbandingan ini tentu tidak serta-merta membuktikan adanya perlakuan yang tidak setara. Setiap perkara memiliki karakteristik dan kebutuhan pembuktian tersendiri.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

MTQ ke-35 Aceh Besar Tinggalkan Kesan Mendalam bagi Para Peserta

Oleh Redaksi · 31 Okt, 15.02 WIB



BANDA ACEH, KOTA JANTHO – Malam penutupan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-35 tingkat Kabupaten Aceh Besar menjadi momen membahagiakan bagi para peserta yang berhasil meraih prestasi di masing-masing cabang perlombaan. Di balik pencapaian tersebut, tersimpan berbagai pengalaman, perjuangan, dan kesan tersendiri selama mengikuti ajang keagamaan yang berlangsung di Lapangan Kemukiman Bung Cala, Kecamatan Kuta Baro, Jumat (30/10/2026).

Bagi para peserta, keberhasilan meraih juara bukan sekadar tentang kemenangan, tetapi juga menjadi pengalaman membanggakan dan berkesan. Ajang tersebut memberikan kesempatan untuk bertemu dengan peserta lain seka-

ligus menunjukkan kemampuan terbaik dalam bidang Al-Qur'an.

Salah satunya dirasakan Razi Ukhrawi dari Kecamatan Kreung Barona Jaya yang berhasil meraih Juara I pada cabang Tilawah Dewasa Putra. Ia mengaku bersyukur dan bangga atas pencapaian tersebut. Menurutnya, suasana perlombaan memberikan pengalaman berharga, terutama saat berhadapan dengan peserta lain yang memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik.

“Perasaannya tentu sangat senang dan bersyukur. Apalagi bisa bertemu dengan banyak peserta yang memiliki kemampuan luar biasa. Ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya, sekaligus motivasi untuk terus memperbaiki bacaan dan meningkatkan kemampuan,” ungkap Razi.

Kesan serupa juga dirasakan Cut Raisatul Haq dari Kecamatan Kota Jantho yang berhasil meraih Juara III pada cabang Tilawah Remaja Putri. Ia mengatakan, mengikuti MTQ ke-35 menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus menantang. Selain mempersiapkan diri untuk tampil, ia juga mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman baru selama mengikuti perlombaan.

“Bagi saya, MTQ ini sangat berkesan. Ada rasa gugup saat tampil, tetapi juga ada kebahagiaan karena bisa mengikuti perlombaan dan bertemu teman-teman dari berbagai daerah. Alhamdulillah, bisa mendapatkan hasil yang baik menjadi kebahagiaan tersendiri,” kata Cut Raisatul Haq.

Sementara itu, Dafiqi Rahmat dari Kecamatan Mesjid Raya, peserta cabang Tilawah Golongan

Tunanetra Putra, mengaku sangat terharu dan bersyukur dapat mengikuti MTQ ke-35 Kabupaten Aceh Besar. Ia menyampaikan bahwa pencapaian dan pengalamannya selama mengikuti perlombaan tidak terlepas dari doa serta dukungan kedua orang tua, sahabat, tim official, dan para pendamping yang telah membantu seluruh peserta selama kegiatan berlangsung.

“Masyaallah, tabarakallah, saya sangat terharu. Alhamdulillah, berkat doa kedua orang tua, dukungan sahabat-sahabat, tim official, para pendamping, serta semua pihak yang telah membantu dan mendampingi kami selama perlombaan, saya bisa melalui pengalaman ini ...

ACEH

Raih Nilai 205, Kafilah Peukan Bada Juara Umum MTQ ke-35 Aceh Besar

Oleh Redaksi · 31 Okt, 07.36 WIB



BANDA ACEH, KOTA JANTHO – Kafilah Kecamatan Peukan Bada tampil sebagai juara umum Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-35 tingkat Kabupaten Aceh Besar Tahun 2026 setelah berhasil meraih nilai tertinggi, yakni 205.

Berdasarkan keputusan Dewan Hakim, Peukan Bada unggul dari kecamatan lainnya dalam perhelatan MTQ yang ditutup Wakil Bupati Aceh Besar, Drs. H. Syukri A. Jalil, di arena utama Lapangan Bung Cala, Kecamatan Kuta Baro, Jumat (30/10/2026) malam.

Koordinator Dewan Hakim, Farhan AP, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil akhir penilaian, Kecamatan Peukan Bada menempati peringkat pertama dengan perolehan nilai 205. Posisi kedua diraih Kecamatan Darul Imarah dengan nilai 137, sedangkan Kecamatan Kuta Baro dengan nilai 124.

Selanjutnya, Kecamatan Blang Bintang menempati peringkat keempat dengan nilai 98, Kecamatan Ingin Jaya di posisi kelima dengan nilai 88, Kecamatan Darussalam di peringkat keenam dengan nilai 83, serta Kecamatan Montasik di posisi ketujuh dengan nilai 81.

Sementara itu, Kecamatan Baitussalam berada di peringkat kedelapan dengan nilai 78, Kecamatan Indrapuri di peringkat kesembilan dengan nilai 70, dan Kecamatan Simpang Tiga menempati peringkat kesepuluh dengan nilai 49.

Dalam sambutannya saat menutup MTQ ke-35, Wakil Bupati Aceh Besar, Drs. H. Syukri A. Jalil, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat serta seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan pelaksanaan MTQ ke-35 tingkat Kabupaten Aceh Besar Tahun 2026 di Kecamatan Kuta Baro.

Apresiasi tersebut disampaikan kepada panitia pelaksana, jajaran Kecamatan Kuta Baro dan masyarakat selaku tuan rumah, aparat keamanan, relawan, Dewan Hakim, serta seluruh official, pelatih, dan peserta dari 23 kecamatan.

“Keberhasilan pelaksanaan MTQ ke-35 ini merupakan hasil kerja sama dan semangat gotong royong semua pihak. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan serta kerja keras seluruh pihak sehingga kegiatan ini berlangsung lancar dan sukses,” ujar Syukri.

Ia juga mengucapkan selamat kepada para peserta yang berhasil meraih prestasi, khususnya Kecamatan Peukan Bada yang keluar sebagai juara umum. Ia berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan dan menjadi motivasi untuk menghadapi MTQ tingkat Provinsi Aceh mendatang.

“Bagi peserta yang meraih juara, jadikan prestasi ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan. Sementara bagi yang belum berhasil, jangan berkecil hati dan teruslah berlatih.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



LINGKUNGAN

Belum Usai! Titik Panas Nasional Bertambah 118, Karhutla Papua Jadi Sorotan

Oleh Van · 30 Okt, 14.54 WIB

Papua — Titik panas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia bertambah menjadi 118 titik, menurut keterangan Kementerian Kehutanan pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Jumlah tersebut meningkat 39 titik dibandingkan sehari sebelumnya.

Papua Selatan menjadi wilayah dengan sebaran tertinggi, yakni 84 titik panas, di tengah laporan kebakaran yang mengancam permukiman dan masyarakat adat di Merauke.

Papua Selatan Catat 84 Titik Panas

Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan, sebaran titik panas lainnya berada di Kalimantan Timur sebanyak 24 titik, Sulawesi Selatan lima titik, Sula-

wesi Tengah empat titik, dan Sulawesi Barat satu titik.

Kementerian Kehutanan menjelaskan, titik panas merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit.

Angka tersebut tidak bisa langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran maupun luas lahan yang terbakar.

“Karena itu, groundcheck, patroli, dan pengecekan langsung tetap dilakukan,” tulis Kementerian Kehutanan dalam siaran pers Nomor SP.652/HKLN/10/2026.

Kebakaran Kimaam Ancam Masyarakat Adat

Sorotan juga datang dari Distrik Kimaam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Akun Threads @waansyahda pada Rabu, 28 Oktober 2026, melaporkan keba-

karan meluas di Kampung Yanggandur dan Kampung Turiram.

“Sejumlah rumah warga dilaporkan terbakar, sementara warga adat menghadapi kepungan asap dengan perlindungan seadanya,” tulis akun tersebut.

Kondisi itu memunculkan kekhawatiran terhadap keselamatan warga serta lingkungan yang menjadi bagian dari ruang hidup masyarakat adat setempat.

Penanganan Karhutla Masih Berlangsung

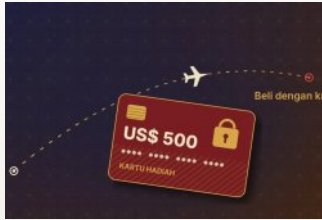
Dalam perkembangan penanganan karhutla, BNPB melaporkan total lahan terbakar di wilayah Papua mencapai sekitar 2.393 hektare.

Dari jumlah tersebut, sekitar 161,5 hektare berada di Papua Selatan.

DIGITAL

Belanja lebih Privat di Amerika Serikat dengan Kartu Hadiah Kripto

Oleh Redaksi · 30 Okt, 09.23 WIB



Kuliah, mengunjungi keluarga, atau liburan: banyak orang Indonesia berangkat ke Amerika Serikat setiap tahun. Sebelum berangkat, ada dua pertanyaan yang jarang dipikirkan: seberapa banyak data belanja yang Anda tinggalkan, dan bagaimana membayar di sana tanpa membawa banyak uang tunai. Kartu hadiah digital dalam dolar menjawab keduanya.

Setiap pembayaran dengan kartu bank meninggalkan jejak: nama Anda, apa yang Anda beli, di mana, dan kapan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Malam Penutupan, Ribuan Warga Saksikan Pengumuman Juara MTQ ke-35 Aceh Besar

Oleh Redaksi · 31 Okt, 02.41 WIB



BANDA ACEH, KOTA JANTHO — Ribuan masyarakat memadati arena utama penutupan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-35 tingkat Kabupaten Aceh Besar di Lapangan Kemukiman Bung Cala, Kecamatan Kuta Baro, Jumat (30/10/2026) malam. Kehadiran masyarakat dari berbagai kecamatan tersebut untuk menyaksikan langsung pengumuman para juara dari seluruh cabang perlombaan yang telah berlangsung selama pelaksanaan MTQ.

Antusiasme masyarakat terlihat sejak menjelang acara penutupan dimulai. Warga datang bersama keluarga, kerabat, serta rombongan pendukung kafilah masing-masing kecamatan. Mereka memenuhi kawasan arena utama untuk mengikuti rangkaian acara

sekaligus menantikan hasil akhir perlombaan yang telah dinantikan.

Salah seorang warga yang hadir bersama keluarganya, Ikhsan, mengaku senang dapat menyaksikan langsung malam penutupan MTQ ke-35 Aceh Besar. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan hanya menjadi ajang perlombaan membaca dan memahami Alquran, tetapi juga momentum mempererat silaturahmi masyarakat dari berbagai kecamatan.

“Alhamdulillah, kami sangat senang bisa hadir dan menyaksikan langsung penutupan MTQ ini. Kami memang ingin mengetahui siapa saja yang berhasil menjadi juara. Semoga kegiatan seperti ini terus dilaksanakan karena sangat baik untuk mendorong generasi muda semakin mencintai Alquran,” ujarnya.

Ia juga berharap kecamatan yang belum berhasil meraih prestasi terbaik pada MTQ kali ini dapat meningkatkan pembinaan dan mempersiapkan diri lebih baik untuk pelaksanaan berikutnya.

“Walaupun kecamatan kami belum berhasil menjadi juara, insyaallah pada MTQ ke-36 nanti bisa meraih prestasi yang lebih baik. Semoga para peserta semakin giat berlatih dan pembinaan terus ditingkatkan,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Syauqi, warga lainnya yang turut menyaksikan malam penutupan. Ia menilai pelaksanaan MTQ memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung kemampuan para peserta sekaligus memberikan dukungan kepada kafilah dari kecamatan masing-masing.

“Menurut saya, MTQ ini sangat bagus karena dapat memotivasi anak-anak dan generasi muda untuk lebih giat belajar Alquran. Kami berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut dan pembinaannya semakin ditingkatkan agar semakin banyak generasi muda yang berprestasi,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil akhir penilaian Dewan Hakim, Kecamatan Peukan Bada berhasil meraih juara umum MTQ ke-35 tingkat Kabupaten Aceh Besar Tahun 2026 dengan perolehan nilai 205.

Posisi kedua diraih Kecamatan Darul Imarah dengan nilai 137, sedangkan peringkat ketiga ditempati Kecamatan Kuta Baro dengan perolehan nilai 124.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



HIBURAN

Dikepung Boikot, RANS Carnival Jogja Sepi, Musisi dan Tenant UMKM Mundur

Oleh Redaksi · 31 Okt, 19.31 WIB



BANDA ACEH - RANS Carnival tak berjalan mulus di hari pertama. Festival hiburan milik RANS Entertainment yang digelar di area parkir Stadion Maguwoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (31/10/2026), terpantau sepi pengunjung. Sejumlah stan UMKM juga kosong setelah tenant memilih batal berjualan. Masalahnya tak hanya di area bazar. Panggung musik RANS Carnival juga kehilangan sejumlah pengisi acara. Tipe-X, Guyon Waton, Masdddho, hingga Orkes Melayu Wawes memutuskan mundur dari festival yang berlangsung selama dua hari, 31 Oktober hingga 1 November 2026 itu. Situasi ini terjadi di tengah seruan boikot terhadap RANS Carnival yang mencuat setelah

Raffi Ahmad menghadiri Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Kamis (29/10/2026). Kehadiran Raffi menuai kritik dan memicu perdebatan di media sosial. Tipe-X menjadi salah satu grup musik yang mengumumkan pembatalan penampilan. Melalui akun media sosial resminya, Sabtu (31/10/2026), manajemen menyampaikan keputusan untuk mundur. "Kita mundur dari acara ini. Sampai jumpa di lain pesta. Salam X," tulis manajemen Tipe-X. Guyon Waton juga membatalkan penampilannya. Grup musik asal Kulon Progo itu menyebut keputusan diambil dengan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan hubungan baik dengan

berbagai pihak. Manajemen memastikan pembatalan bukan karena persoalan teknis maupun materi acara. Orkes Melayu Wawes memilih mundur dengan mempertimbangkan situasi masyarakat Yogyakarta. Masdddho juga mengambil keputusan serupa. Di luar panggung musik, sejumlah tenant UMKM ikut membatalkan keikutsertaan. Bahkan, beberapa di antaranya sudah telanjur membawa perlengkapan ke lokasi sebelum akhirnya membongkar stan dan membawa pulang barang dagangan. Jeruk Lokal Maguwoharjo menjadi salah satu tenant yang mengumumkan pembatalan. Roti Gembong Gedhe disebut mengalihkan stok produk yang telanjur diproduksi ke sejumlah cabang lainnya.

Ada pula Cuann.king yang dikabarkan sempat melakukan loading in pada malam hari, tetapi akhirnya membatalkan keikutsertaan dan melakukan loading out pada dini hari. Artinya, dampak pembatalan tak hanya dirasakan penyelenggara dan pengisi acara. Pelaku UMKM yang semula berharap bisa meraup penjualan dari festival tersebut juga ikut terdampak. RANS Carnival Digelar Gratis RANS Carnival dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November 2026 di area parkir Stadion Maguwoharjo, Sleman. Festival ini menghadirkan pertunjukan musik, bazar UMKM, kuliner, hingga wahana permainan. Pengunjung juga tidak dikenakan biaya masuk.

HIBURAN

Raffi Ahmad Kena Protes di Forum Pemuda, Peserta Teriak Sambil Acungkan Tiga Jari

Oleh Redaksi · 31 Okt, 11.29 WIB



Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad (kanan), mendadak mendapat aksi protes (kiri) saat menghadiri Indonesia Youth Summit 2026 di

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, mendadak mendapat aksi protes saat menghadiri Indonesia Youth Summit 2026 di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Jumat, 30 Oktober 2026. Momen tersebut terjadi ketika Raffi tengah berada di atas panggung bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir. Seorang peserta tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya sambil berteriak dan mengacungkan simbol tiga jari ke arah panggung. Aksi spontan tersebut diduga merupakan bentuk protes yang ditujukan kepada Raffi Ahmad. Petugas keamanan dan panitia yang berada di lokasi langsung bergerak menghampiri pria tersebut untuk mengamankannya dan membawanya keluar ruangan. Sebelumnya, Raffi Ahmad juga menjadi sorotan setelah mengha-

diri acara bertajuk "Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026" yang digelar Polda Metro Jaya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Kamis, 29 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran aparat TNI-Polri, sejumlah peserta yang mengaku sebagai mahasiswa, serta beberapa selebritis, termasuk Raffi Ahmad. Dalam deklarasi tersebut, sejumlah peserta terlihat mengenakan jaket almamater dari beberapa perguruan tinggi, di antaranya Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) dan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia). Kehadiran peserta dengan atribut kampus itu kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Sorotan terutama mengarah pada identitas dan status kemahasiswaan sejumlah peserta yang mengenakan almamater tersebut, bahkan muncul dugaan adanya mahasiswa bodong dalam kegiatan deklarasi itu.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



HIBURAN

Guyon Waton, Wawes hingga Tenant UMKM Mundur di RANS Festival, Ada Apa?

Oleh Redaksi · 31 Okt, 12.04 WIB



YOGYAKARTA - Penyelenggaraan RANS Festival di Maguwoharjo, Sleman,Yogyakarta, pada 31 Oktober hingga 1 November 2026 menuai sorotan.

Sejumlah pihak yang semula terlibat dalam acara tersebut memutuskan mundur, mulai dari pengisi acara musik, tenant UMKM, hingga pembawa acara (MC).

Dari enam penampil yang sebelumnya diproyeksikan meramalkan festival tersebut, tiga di antaranya memilih membatalkan keikutsertaan. Mereka adalah band asal Yogyakarta, Guyon Waton dan Wawes, serta musisi Masdho.

Menariknya, pengumuman mundur dari para musisi tersebut turut disertai simbol tiga hati berwarna hijau, biru, dan merah.

Para personel juga terlihat kompak menggunakan simbol serupa melalui kolom komentar

maupun unggahan Instagram Story masing-masing.

Tiga warna tersebut diketahui menjadi simbol aksi yang digaungkan masyarakat Yogyakarta pada 28 Oktober 2026.

Penggunaan simbol itu pun membuat keputusan para penampil dikaitkan dengan situasi dan aspirasi yang berkembang di wilayah Yogyakarta.

Wawes secara terbuka menyampaikan alasan memilih tidak melanjutkan keterlibatan dalam acara tersebut.

Mereka mengaku tidak ingin keputusan untuk tampil justru melukai perasaan masyarakat.

“Kami tidak ingin melukai hati teman-teman semuanya,” tulis Wawes.

Sementara itu, Masdho menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan semata-mata berkaitan

dengan urusan tampil di atas panggung.

“Bagi kami, musik bukan sekadar hiburan dan panggung bukan hanya tentang penampilan,” tulis Masdho.

Guyon Waton turut memberikan penjelasan mengenai alasan pembatalan penampilan mereka.

Band asal Yogyakarta itu menekankan bahwa pertimbangan utama berkaitan dengan kondisi masyarakat serta situasi di sekitar penyelenggaraan acara.

“Pertimbangan utama kami bukan terkait materi acara melainkan lebih kepada aspek kondusivitas, keamanan masyarakat,” kata Guyon Waton.

Gelombang pembatalan ternyata tidak hanya datang dari pengisi acara.

Salah satu tenant makanan dan minuman, Brokiss Jogja, juga mengumumkan keputusan mem-

batalkan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.

Melalui media sosial, founder Brokiss Jogja menyapa warga Yogyakarta sekaligus menyampaikan bahwa dirinya bersama tim telah memutuskan tidak membuka tenant di acara itu.

“Hallo warga Jogja. Perkenalkan aku founder dari @brokissjogja salah satu tenant fnb yang ikut acara jajar*ns di sleman akhirnya aku dan tim memutuskan untuk CANCEL,” tulisnya.

Pembatalan juga datang dari pembawa acara, Iben Khafiz Miraza.

Dia mengungkapkan sempat menerima tawaran menjadi MC untuk RANS Carnival Maguwoharjo yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November 2026.

HIBURAN

Raffi Ahmad Klarifikasi soal Deklarasi Bersama Diduga Mahasiswa Palsu, Ngaku Cuma Diundang

Oleh Redaksi · 31 Okt, 00.13 WIB



BANDA ACEH - Entertainer sekaligus Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad akhirnya memberikan klarifikasi terkait polemik acara Deklarasi Sumpah Pemuda yang digelar di kawasan Bundaran HI, Jakarta, pada Kamis (29/10/2026).Melalui pernyataan yang diunggah di Instagramnya pada Jumat (30/10/2026), Raffi menegaskan bahwa kehadirannya dalam kegiatan tersebut hanya sebagai undangan.

Ia mengaku baru menerima informasi mengenai acara itu pada malam sebelum kegiatan berlangsung.

Raffi juga menyatakan tidak terlibat dalam perencanaan maupun penyusunan acara.

Ia mengaku tidak mengetahui secara detail susunan kegiatan dan pihak-pihak yang hadir.

"Saat hadir dalam kegiatan deklarasi Sumpah Pemuda kemarin sebagai undangan yang informasinya baru saya terima pada

malam sebelum acara. Saya tidak terlibat dalam perencanaan maupun penyusunan acara. Serta tidak mengetahui detail susunan acara dan pihak-pihak yang hadir," tulis Raffi dalam klarifikasinya.

Selain itu, Raffi turut membantah tuduhan bahwa dirinya mengatur kemunculan salah satu merek dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, gapura dan pembatas jalan yang menampilkan merek itu sudah berdiri jauh sebelum acara deklarasi berlangsung.

Karena itu, ia menegaskan keberadaan merek tersebut tidak berkaitan dengan kehadirannya.

"Saya juga ingin menegaskan bahwa tuduhan mengatur kemunculan salah satu merek tidak benar. Gapura dan pembatas jalan yang menampilkan merek tersebut sudah berdiri jauh sebelum acara dan tidak berkaitan dengan kehadiran saya," lanjutnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



HIBURAN

Raffi Ahmad Klarifikasi soal Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI, Ngaku Hanya Diundang

Oleh Redaksi · 31 Okt, 09.32 WIB



Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni sekaligus selebritas Tanah Air, Raffi Ahmad. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni sekaligus selebritas Tanah Air, Raffi Ahmad, akhirnya buka suara terkait keahadirannya dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, yang menjadi sorotan publik.

Klarifikasi tersebut disampaikan Raffi melalui unggahan di akun Instagram resmi Utusan Khusus Presiden @ukp_mudaseni_raffiahmad dan akun pribadinya @raffinagita1717. Dalam unggahan itu, Raffi menegaskan bahwa dirinya hanya hadir sebagai undangan. Bahkan, informasi mengenai acara tersebut baru diterimanya pada malam sebelum kegiatan digelar

“Assalamualaikum Wr Wb, Selamat malam, izinkan saya untuk meluruskan informasi yang sedang berkembang di media sosial saat ini. Saya hadir dalam kegiatan deklarasi Sumpah Pemuda kemarin sebagai undangan yang informasinya baru saya terima pada malam sebelum acara,” tulis Raffi, dikutip Sabtu (31/10/2026).

Dia juga menegaskan tidak terlibat dalam perencanaan maupun penyusunan acara. Raffi mengaku tidak mengetahui secara detail susunan kegiatan maupun pihak-pihak yang hadir, termasuk sejumlah orang yang disebut-sebut sebagai mahasiswa.

“Saya tidak terlibat dalam perencanaan maupun penyusunan acara, serta tidak mengetahui detail susunan acara dan pihak-pihak yang hadir,” ujarnya.

Selain itu, Raffi membantah tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan kemunculan salah satu merek dalam acara tersebut. Menurut dia, merek yang menjadi perbincangan publik itu sudah terpasang jauh sebelum kegiatan berlangsung.

“Saya juga ingin menegaskan bahwa tuduhan mengatur kemunculan salah satu merek tidak benar. Gapura dan pembatas jalan yang menampilkan merek tersebut sudah berdiri jauh sebelum acara dan tidak berkaitan dengan kehadiran saya,” kata Raffi.

Meski demikian, Raffi mengaku tetap menghargai dan menghormati aspirasi masyarakat, khususnya mahasiswa yang menyampaikan pendapat dalam aksi demonstrasi pada 28 Oktober 2026.

“Saya menghormati teman-teman yang menyampaikan aspi-

rasi pada 28 Oktober 2026. Menyampaikan pendapat adalah hak, dan suara mahasiswa itu penting,” ujarnya.

Dia juga menegaskan selalu terbuka terhadap kritik dan masukan. Namun, Raffi berharap kritik yang disampaikan tetap didasarkan pada fakta dan bukan tuduhan yang tidak benar, terlebih jika menyangkut keluarganya.

“Saya selalu terbuka terhadap kritik dan masukan, tentunya kritik yang didasarkan pada fakta, bukan tuduhan atau fitnah dari dugaan yang tidak benar, terlebih jika menyangkut keluarga,” kata Raffi.

Lebih lanjut, dia mengajak masyarakat untuk memastikan kebenaran informasi sebelum mengambil kesimpulan maupun menyebarkannya kepada publik.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



LINGKUNGAN

3 BERITA

LINGKUNGAN

19 Titik Longsor Terjang 5 Desa di Trenggalek, 103 Warga Terdampak

Oleh Van · 31 Okt, 20.31 WIB



Petugas darurat dan warga meninjau kerusakan parah akibat tanah longsor yang merobohkan sebagian struktur bangunan.

Jawa Timur — Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, memicu tanah longsor di sejumlah wilayah Kecamatan Munjungan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Trenggalek mencatat sebanyak 19 titik longsor yang tersebar di lima desa hingga Sabtu (31/10/2026).

Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Triadi Atmono dalam keterangan resminya pada Sabtu, (31/10/2026) mengatakan pendataan dan penanganan masih dilakukan untuk mengetahui kondisi warga serta dampak kerusakan di lokasi terdampak.

Bencana tersebut berdampak terhadap 34 kepala keluarga (KK) atau 103 jiwa. Sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan

mulai dari kategori ringan hingga sedang.

"Pendataan dan penanganan terus kami lakukan untuk memastikan kondisi warga serta dampak kerusakan akibat tanah longsor," tutur Triadi.

Berdasarkan data sementara BPBD Trenggalek, Desa Craken menjadi wilayah dengan titik longsor terbanyak.

Tercatat ada delapan titik longsor yang mengakibatkan 20 rumah mengalami kerusakan ringan.

Kemudian di Desa Masaran terdapat empat titik longsor dengan dampak lima rumah rusak ringan.

Sementara di Desa Munjungan, satu titik longsor berdampak terhadap dua rumah warga.

Dua desa lainnya mengalami kerusakan rumah dalam kategori sedang.

Di Desa Sobo, Kecamatan Munjungan, terdapat dua titik longsor yang mengakibatkan dua rumah mengalami kerusakan sedang.

Sedangkan di Desa Ngulungkulon, BPBD mencatat empat titik longsor dengan empat rumah mengalami kerusakan sedang.

"Di Desa Sobo ada dua titik longsor dan berdampak ke dua rumah, di Desa Ngulungkulon empat rumah terdampak tanah longsor, kerusakan sedang," papar Triadi.

Secara keseluruhan, 19 titik longsor tersebut tersebar di lima desa di Kecamatan Munjungan.

Dampaknya meliputi kerusakan rumah warga dengan kategori ringan hingga sedang serta puluhan keluarga yang terdampak.

BPBD Trenggalek masih melakukan pemantauan di wilayah ter-

dampak untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya longsor susulan, terutama apabila hujan dengan intensitas tinggi kembali mengguyur kawasan tersebut.

Masyarakat yang tinggal di sekitar lereng maupun wilayah yang rawan longsor juga diminta meningkatkan kewaspadaan.

Warga diimbau segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda seperti retakan tanah, pergerakan lereng, atau kondisi lain yang berpotensi memicu longsor.

Bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Munjungan terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut mulai Kamis (29/10/2026) hingga Jumat (30/10/2026) pagi.

Triadi menyebut kondisi medan menjadi salah satu kendala dalam proses pendataan di lapangan.

LINGKUNGAN

Tembok Sungai Cikalintu Jebol, Banjir Terjang 34 Rumah di Siliwangi Dalam Bandung

Oleh Redaksi · 31 Okt, 08.37 WIB



Banjir besar menerjang pemukiman warga di Jalan Siliwangi Dalam, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (30/10/2026). FOTO/Net.

BANDA ACEH – Banjir besar menerjang pemukiman warga di Jalan Siliwangi Dalam, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (30/10/2026).

Banjir terjadi akibat tembok penahan tanah di aliran Sungai Cikalintu jebol.

Derasnya kiriman air dari wilayah hulu membuat debit sungai melonjak drastis hingga meluap. Naas, luapan air terjadi di saat proyek perbaikan tembok penahan tanah di lokasi tersebut masih berlangsung.

Rekaman video amatir milik warga memperlihatkan detik-detik mencekam saat banjir melanda pemukiman di sepanjang aliran sungai. Air bercampur sampah yang melimpah kemudian menerjang rumah-rumah warga dan menyeret berbagai barang berharga.

Salah seorang warga terdampak, Kokon Sodik, mengaku telah berupaya melakukan langkah antisipasi dengan menyiapkan karung penahan serta memindahkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Namun, derasnya benturan arus air membuat rumahnya tetap terendam banjir.

"Kami sudah siapkan karung dan mindahin barang-barang ke

tempat tinggi buat jaga-jaga. Tapi karena arusnya terlalu deras dan tembok jebol, air tetap masuk dan merendam rumah," kata Kokon di lokasi kejadian.

Bencana banjir luapan Sungai Cikalintu ini merupakan peristiwa kedua yang melanda kawasan tersebut dalam kurun waktu sebulan terakhir. Kejadian serupa sebelumnya dilaporkan terjadi pada 23 Oktober lalu.

Camat Coblong, Ratnarahayu, menyebutkan bahwa berdasarkan data awal di lapangan, tercatat ada 34 rumah yang dihuni oleh total 112 jiwa terdampak luapan air.

"Total ada 34 rumah dengan 112 jiwa yang terdampak. Dari jumlah tersebut, tiga rumah mengalami kerusakan fisik, di mana dua rumah rusak berat dan satu rumah rusak ringan," terang Ratnarahayu.

Saat ini, pihak Kecamatan Coblong bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung tengah berkoordinasi untuk membersihkan material sisa banjir di pemukiman.

Pihak kecamatan juga mengimbau seluruh warga yang bermukim di sepanjang aliran Sungai Cikalintu untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan deras mengguyur kawasan hulu.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



LINGKUNGAN

Persiapan Penilaian Adipura 2026, Pemko Banda Aceh Gelar Rapat Koordinasi

Oleh Redaksi · 31 Okt, 12.48 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh mematangkan persiapan menghadapi penilaian Adipura 2026. Rapat koordinasi dilaksanakan di Balai Keurukon, Banda Aceh, Jumat (30/10/2026).

Rapat tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Banda Aceh Bachtiar, Kepala DLHK3 Kota Banda Aceh Hamdani, seluruh Kepala OPD, para Camat, Keuchik, dan unsur terkait lainnya.

Agenda rapat membahas strategi dan komitmen bersama dalam menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota menjelang penilaian nasional tersebut.

Dalam arahnya, Bachtiar menegaskan bahwa menjaga

kebersihan dan keindahan kota bukan hanya tugas Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3), melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.

“Menjaga keamanan dan ketertiban, serta menjaga kebersihan dan keindahan kota adalah tugas kita bersama. Dengan keterbatasan tenaga yang ada, kita harus melibatkan masyarakat secara kolektif,” ujar Bachtiar.

Ia mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk memulai gerakan kebersihan dari lingkungan terkecil.

“Marilah kita bersama-sama membersihkan lingkungan kita sendiri, mulai dari lingkungan

rumah hingga pekarangan,” imbaunya.

Sementara itu, Kepala DLHK3 Kota Banda Aceh Hamdani menyampaikan bahwa pada penilaian Adipura 2025, Kota Banda Aceh berhasil meraih penghargaan kategori pembinaan. Banda Aceh tercatat sebagai salah satu dari 10 kota di Indonesia yang meraih kategori tersebut.

“Kategori pembinaan ini merupakan kategori terbaik pada penilaian tahun lalu. Alhamdulillah, hingga saat ini Kota Banda Aceh telah 11 kali meraih penghargaan Adipura,” jelas Hamdani.

Untuk tahun 2026, Pemko Banda Aceh menargetkan capaian yang lebih tinggi.

“Insyaallah, kita berharap pada kesempatan ke-12 ini Kota Banda

Aceh dapat meraih Adipura Kenca. Memang cukup berat, namun kita akan berusaha semaksimal mungkin,” tegasnya.

Hamdani mengimbau seluruh masyarakat untuk berperan aktif menjaga kebersihan kota.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat Kota Banda Aceh untuk menjaga kebersihan bersama, minimal dengan menjaga lingkungan masing-masing dan mulai memilah sampah dari sumber,” katanya.

Imbauan tersebut, lanjutnya, juga ditujukan kepada pengunjung, pelaku usaha, pedagang, dan pengguna jalan agar turut menjaga kebersihan lingkungan dan tempat usaha masing-masing selama periode penilaian Adipura berlangsung.***

ANEKA BERITA

9 BERITA

ISLAM

Karhutla Belum Berakhir

Oleh Nurjannah · 31 Okt, 20.50 WIB



Seorang anak kecil bermasker duduk di tanah hangus dengan latar belakang api, asap tebal, dan ekskavator yang sedang beroperasi. Di depannya tergeletak sebuah palu hakim kayu besar, yang secara simbolis mempertanyakan keadilan hukum atas perusakan alam dan deforestasi. FOTO/AI for HAI.

APORAN terbaru dari lembaga think tank asal Helsinki, CREA mengungkapkan sekitar 57,8 juta penduduk Indonesia menghirup udara beracun dengan tingkat kualitas udara tidak sehat hingga berbahaya.

Pemburuan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mendorong perkiraan angka kematian hingga mencapai 3.560 kasus pada September 2026.

Studi CREA tersebut mengukur estimasi angka kematian akibat paparan partikel halus PM2.5 dalam jangka pendek atau hitungan hari.

Partikel PM2.5 berukuran sangat kecil sehingga mampu menembus paru-paru hingga aliran darah.

Sebagian besar kematian akibat polusi asap karhutla tercatat terjadi di wilayah Kalimantan, Jawa,

Sumatra, serta kawasan timur Indonesia.

Meskipun karhutla sudah berlangsung lama akan tetapi hingga hari ini api belum padam. Buktinya masih ada titik api di beberapa wilayah. Di Papua per 29 Oktober masih tercatat 65 titik api.

Sementara itu jumlah titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional meningkat menjadi 154 titik pada Kamis (29/10/2026) pukul 21.00 WIB.

Meski titik panas tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya hutan terbakar.

Tapi setidaknya ini menjadi gambaran bahwa persoalan titik api dan karhutla ternyata belum berakhir.

Padahal korban terus berjatuhan baik yang meninggal maupun yang

akan merasakan efek jangka panjang karhuta.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 314.124 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama periode 20 Agustus-20 Oktober 2026.

Sebanyak 71 ribu di antaranya merupakan korban balita (CNN, 23-10-2026).

Apakah negara kita tidak punya aturan tentang hutan dan lingkungan? Berdasarkan undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Negara memiliki kewajiban utama berkaitan dengan lingkungan dalam pencegahan, pengendalian, penegakan hukum, dan pemulihan akibat karhutla.

Sayangnya, peran ini tidak terwujud baik dari segi pencegahan apalagi pengendaliannya.

Untuk penegakan hukum berdasarkan Pasal 108 UU PPLH, pelaku karhutla dapat diancam pidana penjara 3 hingga 10 tahun dan denda miliaran rupiah, serta penerapan asas strict liability (tangung jawab mutlak) bagi korporasi di dalam wilayah konsesinya.

Semua aturan dan undang-undang ini tidak berjalan, sebab aturan ini dibangun atas asas sekulerisme yaitu pemisahan agama dari kehidupan.

Buktinya sejak undang-undang ini disahkan tiap tahun karhuta terus meluas.

Benar ada korporasi yang mendapat sanksi akan tetapi negara terus memberikan ijin kepada korporasi.

EDUKASI

Kunyit Jadi Harapan Baru, 17 Mahasiswa USK Disambut Hangat Warga Blang Tingkeum

Oleh Syarifudin Brutu · 31 Okt, 15.37 WIB



Momen kebersamaan mahasiswa dalam program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Desa Blang Tingkeum.

ACEH BESAR – Menjelang siang, gedung serbaguna PKK Gampong Blang Tingkeum, Kecamatan Seulimeum, Aceh Besar, mendadak ramai. Warga berkumpul. Di hadapan mereka, 17 mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) berdiri dengan satu tujuan: tinggal sembilan hari di kampung ini dan mengubah kunyit menjadi peluang.

Sabtu (31/10/2026) pukul 11.00 WIB, para mahasiswa resmi diserahterimakan kepada pihak gampong. Dua dosen pembimbing, Dr. Risa Nursanty, M.Si dan Dr. Saudah, S.Pd, M.Si, mengantarkan langsung rombongan ke lokasi.

Mereka datang membawa program PKM Berdampak, Aksara Mahasiswa, DPPM BIMA 2026, dengan tajuk "Penerapan Teknologi Pengolahan Teh Herbal Berbasis Tumbuhan Obat Lokal untuk Penguatan Kesehatan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Blang Tingkeum". Sasarannya jelas: kunyit yang tumbuh di tanah sendiri diolah menjadi teh herbal, sekaligus menggerakkan ekonomi warga.

"Kami Ingin Ada yang Ditinggalkan"

Bagi warga, kedatangan mahasiswa bukan sekadar kunjungan. Nuraini, istri Geuchik Gampong Blang Tingkeum, tak menyembunyikan rasa senangnya. Namun ia menitipkan satu pesan penting.

"Saya sangat senang dengan kedatangan mahasiswa kemari. Kami berharap ada sesuatu yang bisa ditinggalkan saat mahasiswa pulang dari kampung kami, entah kenang-kenangan atau produk hasil program ini yang bermanfaat dan berkelanjutan," ujarnya.

Harapan serupa datang dari seorang warga. Baginya, program ini bisa menjadi pintu perubahan.

"Semoga program dan kedatangan mahasiswa ke sini membawa perubahan, memajukan ekonomi, dan membuka mata pencaharian baru bagi masyarakat," tuturnya.

Sembilan hari memang singkat. Tetapi di Blang Tingkeum, warga berharap yang tertinggal bukan hanya jejak kaki mahasiswa, melainkan sebuah produk dan usaha yang terus hidup setelah mereka pulang.(*)

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



EKONOMI

Binance Dibobol, Rp114 Triliun Aset Kripto Raib dalam Waktu 20 Menit

Oleh Van · 31 Okt, 20.25 WIB



Bitcoin berkilau di depan logo bursa kripto terkemuka, Binance. Masa depan keuangan digital ada di tangan Anda.

Jakarta — Bursa kripto Binance diguncang serangan siber besar setelah sekitar US\$6,3 miliar atau setara Rp114 triliun aset kripto dicuri dalam sebuah insiden yang sebagian besar berlangsung hanya sekitar 20 menit.

Dilansir dalam keterangan resmi The Athletic pada Sabtu, (31/10/2026) peretasan tersebut menjadi salah satu insiden terbesar dalam sejarah aset digital.

Berdasarkan catatan blockchain, aktivitas transaksi mencurigakan mulai terdeteksi pada Kamis (29/10/2026) malam waktu setempat.

Sebagian besar pencurian berlangsung dalam rentang sekitar 20 menit. Analisis terhadap aktivitas blockchain juga menunjukkan adanya transaksi tidak biasa dari dompet yang terdampak.

Binance kemudian melakukan investigasi untuk mencari sumber

serangan. Pada awalnya, perusahaan menduga insiden tersebut berkaitan dengan laptop yang telah disusupi.

Namun, penyelidikan lanjutan menemukan adanya titik masuk lain ke dalam sistem.

"Investigasi lanjutan kami telah menemukan titik-titik peretasan tambahan," tulis Binance dalam pernyataan resminya di platform X.

Perusahaan analisis blockchain TRM Labs menyebut serangan tersebut diduga menasar infrastruktur signing Binance, yakni sistem yang digunakan untuk mengotorisasi transaksi.

Dengan akses tersebut, penyerang diduga dapat mengeluarkan instruksi untuk melakukan penarikan dari dompet yang terdampak.

Binance dalam pembaruan resminya menyatakan insiden tersebut menyebabkan sekitar US\$6,3

miliar aset token terdampak. Perusahaan juga menyebut belum menemukan bukti bahwa private key dompet bocor.

Binance Tanggung Kerugian Pengguna

Di tengah penyelidikan, Binance memastikan pengguna tidak akan menanggung kerugian akibat pencurian tersebut.

Binance menyatakan akan menanggung seluruh kerugian melalui Secure Asset Fund for Users (SAFU) dan dana perusahaan.

Dalam pembaruan 30 Oktober, Binance mengatakan telah menyiapkan lebih dari US\$6,34 miliar dana perusahaan untuk menutup dampak insiden tersebut.

Sekitar US\$5 miliar di antaranya sudah tersedia dalam aset token yang sesuai dengan aset yang terdampak.

Binance juga bekerja sama dengan perusahaan analisis blockchain, penerbit aset, aparat penegak hukum, dan sejumlah pihak lain untuk melacak dana hasil pencurian.

Sekitar US\$3 miliar aset yang terdampak disebut telah berhasil dibekukan secara on-chain. Proses pelacakan dan pemulihan aset masih berlangsung.

Sebagai langkah pengamanan, Binance sempat menghentikan layanan penarikan untuk melakukan pemeriksaan keamanan tambahan dan memastikan sistem yang terdampak telah aman.

Identitas pelaku hingga kini belum dipastikan secara resmi.

CEO Binance Richard Teng menyatakan investigasi internal masih dilakukan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.

SPORT

32 Klub Siap Bersaing di Kuta Gunong Cup 2026, Kick-Off 1 November

Oleh Redaksi · 31 Okt, 17.35 WIB



ACEH BESAR – Turnamen sepak bola Semi Open Kuta Gunong Cup 2026 siap bergulir.

Sebanyak 32 klub dari berbagai daerah di Aceh Besar dan Banda Aceh dipastikan ambil bagian dalam kompetisi yang memperebutkan total hadiah Rp45 juta tersebut.

Turnamen ini dijadwalkan berlangsung mulai Minggu (1/11/2026) hingga 16 November 2026, bertempat di Lapangan Kuta Gunong FC, Gampong Jruuk Bale–Jruuk Bak Kreh, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.

Pembukaan turnamen pada Minggu (1/11/2026) direncanakan dihadiri Ketua DPRK Aceh Besar, Abdul Muchti yang sekaligus akan membuka secara resmi kompetisi tersebut.

General Manager (GM) Kuta Gunong, IPDA Agus Munawar kepada media ini, Sabtu (31/10/2026), mengatakan seluruh persiapan penyelenggaraan turnamen telah rampung 100 persen.

Menurutnya, panitia telah mematangkan berbagai kebutuhan teknis, mulai dari kesiapan lapangan, penyusunan jadwal pertandingan, hingga persiapan pelaksanaan kompetisi.

“Alhamdulillah, persiapan Kuta Gunong Cup 2026 sudah rampung 100 persen. Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, aman dan sukses hingga pertandingan final,” ujar IPDA Agus Munawar.

Ia menjelaskan, turnamen ini tidak hanya berorientasi pada perebutan gelar juara dan hadiah, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antar klub, membangun kebersamaan, serta

mengembangkan potensi sepak bola di tengah masyarakat.

Selain itu, kompetisi tersebut diharapkan memberikan ruang kepada para pemain, khususnya generasi muda, untuk menyalurkan bakat, meningkatkan kemampuan, dan mengasah mental bertanding.

32 Klub Siap Bersaing

Berdasarkan jadwal resmi panitia, Kuta Gunong Cup 2026 akan berlangsung selama 16 hari, mulai 1 hingga 16 November 2026.

Sebanyak 32 klub akan bersaing menggunakan sistem gugur. Setiap pertandingan menjadi penentu perjalanan tim untuk melaju ke babak berikutnya hingga mencapai partai final.

Persaingan diperkirakan berlangsung menarik karena peserta berasal dari sejumlah kecamatan di Aceh Besar serta beberapa wilayah di Banda Aceh.

Adapun 32 klub yang akan berlaga dalam Kuta Gunong Cup 2026 yakni:

- Lamsiteh Cot FC (Kuta Malaka)
- Lampoh Kawat FC (Montasik)
- Putra Lamteuba (Seulimeum)
- PSPL Limo FC (Indrapuri)
- Carlos Lhoknga (Lhoknga)
- Mitra SP 3 FC (Simpang Tiga)
- Anaconda FC (Darul Imarah)
- PSPP Grot (Indrapuri)
- TMC Lamnga Legend (Mesjid Raya)
- Krueng Raya FC (Mesjid Raya)
- Persakti Tibang (Syiah Kuala)
- Persib Baet FC (Sukamakmur)
- Kuta Gunong FC (Indrapuri)
- Porrkad 1972 FC (Pulo Aceh)
- Comet FC (Ingin Jaya)
- Badak Putih (Seulimeum)

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



KOMUNITAS

Muskot V PMI Sabang Jadi Momentum Perkuat Organisasi dan Pelayanan Kemanusiaan

Oleh Redaksi · 31 Okt, 20:52 WIB



SABANG — Pemerintah Kota Sabang berharap Musyawarah Kota (Muskot) V Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Sabang Tahun 2026 dapat melahirkan kepemimpinan yang amanah serta program kerja berkelanjutan guna memperkuat pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat.

Harapan tersebut disampaikan Plt. Sekretaris Daerah Kota Sabang Rinaldi Syahputra saat membuka Muskot V PMI Kota Sabang yang berlangsung di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Sabang, Sabtu (31/10/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua PMI Kota Sabang yang juga merupakan Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus, Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Aceh Musni Haffas, sejumlah kepala perangkat daerah, para

camat, pengurus PMI tingkat kota dan kecamatan, relawan, serta anggota Palang Merah Remaja (PMR).

Dalam sambutannya, Plt. Sekda menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran PMI Kota Sabang atas kontribusi dan pengabdianya dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, mulai dari pelayanan sosial, kesiapsiagaan bencana, donor darah hingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Rinaldi menilai, Muskot menjadi kesempatan penting bagi organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan program sebelumnya, menyusun rencana kerja ke depan, sekaligus menentukan kepemimpinan untuk periode selanjutnya.

Karena itu, seluruh peserta diharapkan mengedepankan kebersa-

maan, keterbukaan, dan musyawarah untuk mufakat dalam setiap proses pengambilan keputusan.

“PMI memiliki peran penting dalam pelayanan kemanusiaan. Kami berharap melalui musyawarah ini lahir kepemimpinan yang mampu menjaga soliditas organisasi, memperkuat kapasitas relawan, meningkatkan kesiapsiagaan bencana, serta mengoptimalkan pelayanan donor darah dan edukasi kepalangmerahan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PMI Kota Sabang Suradji Junus mengatakan, Muskot V menjadi momentum bagi seluruh jajaran PMI untuk memperkuat kebersamaan, mengevaluasi capaian organisasi, serta merumuskan arah dan program kerja yang lebih baik untuk periode mendatang.

“Melalui Muskot V ini, kami berharap dapat mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus merumuskan program kerja yang lebih baik untuk periode mendatang. Yang terpenting, seluruh jajaran PMI tetap solid dan memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” harap Suradji.

Melalui Muskot V ini, PMI Kota Sabang diharapkan semakin solid, responsif, dan mampu memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kemanusiaan di Kota Sabang.[]

EKONOMI

Seminggu IHSG Babak Belur, Duit Asing Justru Masuk ke Saham Ini

Oleh Van · 31 Okt, 17:55 WIB



Pantauan terkini pergerakan IHSG yang ditutup di zona merah pada level 5.058,50.

Jakarta — IHSG sepekan Oktober 2026 mengalami tekanan besar dengan penurunan sekitar 7,03 persen. Namun, di tengah ramainya aksi jual, sejumlah saham justru masih diborong investor asing, termasuk GOTO dan BUMI.

Fenomena ini menarik perhatian karena menunjukkan bahwa pelemahan indeks tidak membuat seluruh saham ditinggalkan investor. Pada perdagangan Jumat, 30 Oktober 2026 sesi pertama, nilai pembelian bersih asing atau net buytercatat mencapai Rp253,09 miliar.

GOTO menjadi salah satu saham yang paling banyak dibeli bersih investor asing dengan nilai Rp70,10 miliar. BUMI menyusul dengan net buy Rp50,04 miliar.

IHSG Merah, GOTO dan BUMI Masih Diserok Asing

Sepanjang pekan perdagangan 26–30 Oktober 2026, IHSG bergerak melemah dari 5.439,26 pada penutupan 23 Oktober menjadi 5.057,05 pada akhir perdagangan 30 Oktober.

Tekanan tersebut terjadi di tengah kekhawatiran pasar terhadap evaluasi MSCI dan persoalan transparansi kepemilikan saham di Indonesia.

Meski demikian, data perdagangan sesi pertama Jumat menunjukkan investor asing masih mengakumulasi sejumlah saham. Selain GOTO dan BUMI, saham BBNI, MDKA, PACK, CUAN, ASII, DEWA, BRMS, dan MBMA juga mencatat pembelian bersih.

Di sisi lain, beberapa saham justru mengalami tekanan jual

asing. BBRI mencatat net sell Rp114,88 miliar, disusul AMMN sebesar Rp32,66 miliar dan ISAT Rp27,31 miliar.

Perbedaan arus transaksi tersebut memperlihatkan bahwa investor tidak mengambil keputusan yang sama terhadap seluruh saham. Ketika sebagian melepas kepemilikan, sebagian lainnya justru memanfaatkan pergerakan harga untuk masuk ke emiten tertentu.

Apakah Ini Sinyal Smart Money?

Aksi beli bersih investor asing kerap menjadi perhatian pelaku pasar karena dapat memberikan gambaran mengenai minat modal besar terhadap saham tertentu. Fenomena ini sering dikaitkan dengan istilah smart money.

Namun, net buy asing tidak otomatis berarti saham tersebut akan naik atau menjadi rekomendasi investasi. Data transaksi hanya menunjukkan selisih pembelian dan penjualan dalam periode tertentu, bukan alasan investor melakukan transaksi.

Karena itu, investor tetap perlu melihat faktor lain seperti kinerja keuangan emiten, valuasi, likuiditas, prospek bisnis, dan risiko pasar.

MSCI Jadi Momentum Pembelian Pasar Modal

Tekanan terhadap IHSG juga menjadi pengingat pentingnya transparansi dan kredibilitas pasar modal. MSCI sebelumnya menyoroti persoalan keterbukaan informasi kepemilikan saham serta konsentrasi perdagangan di pasar Indonesia.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



OPINI

Asap Lintas Batas: Uji Tuntas Pertanggungjawaban Korporasi dan Negara atas Karhutla

Oleh RADIT FABIAN · 31 Okt, 11.46 WIB



Gambar ini menampilkan kontras tajam antara kebakaran hutan di sisi kiri dan kabut asap yang menyelimuti kota modern (merepresentasikan Singapura) di sisi kanan. Di bagian tengah depan, terdapat palu hakim yang diletakkan di atas peta konseksi yang terbakar, melambangkan upaya penegakan hukum yang harus menjangkau aktivitas korporasi di balik kerusakan lingkungan lintas

EBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) bukan lagi sekadar persoalan lingkungan domestik. Asap yang dihasilkan dapat melintasi batas teritorial dan mengancam kesehatan masyarakat di negara lain.

Fenomena ini sekaligus menguji kemampuan hukum dalam menjangkau korporasi yang aktivitas usahanya menimbulkan kerusakan ekologis serta keseriusan negara dalam memenuhi kewajiban perlindungan lingkungan hidup.

Pada 16 Oktober 2026, National Environment Agency (NEA) Singapura menerbitkan Preventive Measure Notices berdasarkan Transboundary Haze Pollution Act kepada tujuh perusahaan yang memiliki konsesi di Indonesia.

Langkah serupa kembali diumumkan pada 19 Oktober 2026 terhadap tiga perusahaan lainnya.

NEA menyatakan terdapat indikasi keterkaitan kebakaran di wilayah konsesi perusahaan terse-

but dengan pencemaran asap yang bergerak menuju Singapura.

Pemberitahuan itu mewajibkan perusahaan melakukan pemadaman dan mengambil langkah pencegahan kebakaran.

Tentu, pemberitahuan tersebut bukan putusan pengadilan yang menyatakan perusahaan bersalah.

Namun, langkah Singapura memperlihatkan perkembangan penting, negara terdampak mulai menggunakan instrumen hukum nasional untuk menjangkau aktivitas korporasi yang berlangsung di luar wilayah kedaulatannya.

Pertanyaannya, ketika kebakaran terjadi di Indonesia tetapi dampaknya dirasakan negara tetangga, siapa yang harus bertanggung jawab: korporasi, negara, atau keduanya?

Korporasi dan tanggung jawab ekologis

Dalam rezim hukum kita, dasar pertanggungjawaban korporasi

sebenarnya telah tersedia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) melalui Pasal 69 ayat (1) huruf h melarang pembukaan lahan dengan cara membakar.

Pasal 116 juga membuka ruang pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana.

Dalam artian, korporasi tidak dapat berlindung di balik status badan hukum untuk melepaskan tanggung jawab atas kegiatan usahanya.

Pertanggungjawaban juga perlu menelusuri pihak yang mengambil keputusan, mengendalikan operasional, dan memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut.

Terlebih, struktur bisnis modern memungkinkan penguasaan lahan, pendanaan, dan pengambilan

keputusan dilakukan oleh entitas hukum yang berbeda.

Karena itu, penegakan hukum tidak semestinya berhenti pada perusahaan operasional apabila terdapat bukti keterlibatan pihak lain dalam pengendalian kegiatan usaha.

Selain sanksi pidana, Pasal 87 UUPPLH mengatur kewajiban ganti rugi dan/atau tindakan tertentu bagi penanggung jawab usaha yang melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian lingkungan.

Sementara itu, Pasal 88 mengenai prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) terhadap kegiatan yang memenuhi kriteria penggunaan bahan berbahaya dan beracun ...

ISLAM

Kompetisi Halal Lifestyle di Negeri Muslim, Paradoks!

Oleh Rut sw · 31 Okt, 10.10 WIB



Bersiaplah untuk ajang bergengsi Gen Halal Championship 2025 yang penuh semangat!

EN Halal Championship 2026 session 2 resmi digelar, Grand Final dijadwalkan berlangsung pada 6–8 November 2026 yang akan datang.

Ajang ini diselenggarakan oleh LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) MUI. Diikuti oleh pelajar SMA/SMK/MA sederajat di seluruh Indonesia.

Acara ini tak sekadar ajang kompetisi, namun sekaligus menjadi salah satu sarana edukasi halal bagi pelajar untuk memperluas pengetahuan sekaligus menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya prinsip halal dalam kehidupan sehari-hari.

Wakil Ketua Umum MUI, KH Muhammad Cholil Nafis, mengajak generasi muda untuk mengenal dan menerapkan halal lifestyle karena ajaran Islam mengenai halal dan haram tidak terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga berkaitan dengan pola hidup seorang muslim.

Kyai Cholil mengatakan dalam ajaran Islam, halal dan haram merupakan prinsip yang menjadi pertimbangan dalam menjalani kehidupan, sangat perlu ditanamkan sejak dini agar generasi muda tidak hanya mengenal konsep halal secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya ketika menentukan pilihan sehari-hari.

Terlebih hari ini generasi muda berhadapan dengan beragam pilihan produk, tren konsumsi, dan perkembangan gaya hidup.

Pengetahuan mengenai halal dapat membantu mereka lebih kritis dalam mencari informasi

dan menentukan produk yang digunakan.

Session 2 ini mengusung tema “Explore, Compete, Inspire”.

Kompetisi ini mengajak peserta mengeksplorasi pengetahuan mengenai halal, menguji kemampuan melalui rangkaian kompetisi, serta mendapatkan inspirasi untuk berkontribusi dalam penguatan ekosistem industri halal di masa mendatang, merekalah generasi muda yang diharapkan keterlibatannya dalam membangun ekosistem industri halal Indonesia.

Kompetisi Digelar, Kesadaran Ambyar

Acara ini sangatlah baik, bertujuan mengenalkan gaya hidup halal (Halal life style), namun jika kita jujur ini sangatlah ironi, paradoks sistem kapitalisme yang menjadi kenyataan.

Kemana saja kita selama ini hingga prinsip halal haram harus diperlombakan di usia anak sudah baligh, di sebuah negeri yang mayoritas muslim pula?

Jelas ini akibat sistem kapitalisme yang dasarnya sekuler, memisahkan agama dari kehidupan.

Halal haram yang seharusnya menjadi bagian dari pendidikan sejak dini setiap anak, ada keluarganya yang memberikan pendidikan awal, ada masyarakat dan negara bertugas menjaga dengan saling mengingatkan semua itu tidak ada.

Bahkan, orang tua sendiri asing soal halal haram.

Yang mereka tahu babi haram, tapi seks bebas, riba, menutup aurat malah jadi pilihan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



SPORT

10 Pemain Rookie Terbaik dalam Sejarah NBA

Oleh Redaksi · 31 Okt, 00.10 WIB



10 Pemain pendatang baru yang terbaik dalam sejarah NBA. FOTO/Dok. Andrey.

BANDA ACEH - Musim pertama di NBA hampir selalu menjadi ujian berat bagi para pemain. Namun, ada pengecualian dalam setiap aturan—yaitu mereka yang langsung menunjukkan: liga ini sekarang milikku. Berikut ini adalah 10 rookie paling mengesankan dalam sejarah NBA, menurut 1xBet Indonesia.

Wilt Chamberlain (1959-60)

Ketika Wilt bergabung dengan NBA, dunia bola basket terbagi selamanya menjadi periode “sebelum” dan “sesudah”. Statistik musim perdananya tampak seperti angka-angka dalam video game: 37,6 poin dan 27,0 rebound. Chamberlain tidak hanya dinobatkan sebagai Rookie of the Year; ia langsung meraih penghargaan tertinggi liga—gelar MVP. Pada

musim itu, ia memecahkan delapan rekor NBA yang ada!

Oscar Robertson (1960-61)

Pada musim pertamanya, point guard Cincinnati Royals ini rata-rata mencatatkan hampir triple-double setiap pertandingan, dengan rata-rata 30,5 poin, 10,1 rebound, dan 9,7 assist. Robertson seolah-olah memainkan bola basket dari masa depan pada masa ketika orang-orang sama sekali belum tahu apa itu “1xBet?”. Dia adalah orang pertama yang membuktikan bahwa pemain guard bisa menjadi bintang utama sebuah tim.

Rick Barry (1965-66)

Dengan rata-rata 25,7 poin dan 10,6 rebound per pertandingan, Barry dengan cepat menjadi salah satu pencetak poin paling berba-

haya dan eksplosif di liga. Ia dinobatkan sebagai Rookie of the Year dan masuk ke dalam All-NBA First Team. Barry sangat menuntut rekan-rekan setimnya, tetapi hal itu hanya karena ia mengharapkan mereka bermain pada level yang sama dengannya.

Wes Unseld (1968-69)

Dengan tinggi hanya 201 sentimeter, Unseld bermain sebagai center dan berhasil mencetak rata-rata 18,2 rebound per pertandingan serta menyumbang 13,8 poin. Pertahanan fenomenalnya dan umpan-umpan yang menjangkau seluruh lapangan membantu Baltimore melompat dari 36 kemenangan menjadi 57 dalam satu musim. Wes menjadi pemain kedua—dan, sejauh ini, yang terakhir—setelah Wilt Chamber-

lain yang berhasil meraih gelar Rookie of the Year dan MVP pada musim debutnya.

Kareem Abdul-Jabbar (1969-70)

Saat itu dikenal sebagai Lew Alcindor, pemain center tersebut langsung menjadi bintang NBA. Dengan rata-rata 28,8 poin dan 14,5 rebound per pertandingan, tembakan skyhook-nya yang terkenal terbukti menjadi senjata yang tak terbendung sejak musim pertamanya. Kareem mengambil alih tim Milwaukee yang saat itu tak berprospek—yang hanya meraih 27 kemenangan pada musim sebelumnya—dan seketika mengubahnya menjadi tim penantang gelar (56 kemenangan).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



REDAKSI

PENERBIT	PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI	Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA	Adam
REDAKTUR	Hayat
SEKRETARIS REDAKSI	Ola

Jurnalis	
Banda Aceh:	
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR	12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani	
Bireuen:	
1. M. Ilham Sakubat	
Lhokseumawe:	
1. Yoppi	
Aceh Barat:	
1. Kurniawan	
Jawa Timur:	
1. Rut Sriwahyuni	
Fotografer:	
1. Mishabul Amin	
2. Nazaruddin	
Social Media Manager:	
1. Syukur M. Amin	